

MODERASI BERAGAMA **Pada Diskresi Kepolisian**



***Dalam Memberantas
Kriminalitas Geng Motor***

MUHAMMAD IKRAM NUR FUADY, S.H., M.H.



MODERASI BERAGAMA PADA DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS KRIMINALITAS GENG MOTOR

Muhammad Ikram Nur Fuady, S.H., M.H.



Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor

Penulis: Muhammad Ikram Nur Fuady, S.H., M.H.

Editor: Muh. Abdi Goncing

Setting & Layout: Ahmad Rifai

Proofreader: Arman Sine & Widya Lestari

Design Cover: Igbo' eL_Machete

Cetakan Pertama, Agustus 2020

ISBN: 978-602-328-264-7

ix + 177 halaman; 15,5 × 23 Cm

Penerbit

Alauddin University Press

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63

Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id>

SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Puji syukur kepada Allah swt atas segala nikmat, rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global Covid-19, karya buku ***“Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor”*** yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program **Gerakan Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi**, karya ini dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses *upgrading* kapasitas dan *updating* perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas.

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya

manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori sekaligus *legacy* bagi penulisnya di masa datang. UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki *basic core* pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban bangsa.

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt senantiasa merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. *Amin...*

Makassar, 17 Agustus 2020

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menggetarkan hati, meluruskan pikiran, menggerakkan tangan, untuk belajar merangkai dan mengumpulkan ide, gagasan, serta menganalisis fenomena perilaku, bahasa dalam kehidupan di masyarakat, khususnya fenomena perbuatan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor atau akrab disebut dengan geng motor. Buah dari proses tersebut telah terwujud dengan melahirkan gagasan buku yang ada pada tangan pembaca yang terhormat dan mulia.

Buku ini merupakan buku referensi yang memuat hasil penelitian penulis sendiri, sehingga pembaca akan banyak mendapatkan kata penulis dalam pembahasannya. Buku yang sarat dengan pandangan pemikiran ke arah integrasi keilmuan, antara teori dan penerapan di lapangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam memberantas kriminalitas geng motor. Buku ini menyorot diskresi yang dilakukan aparat kepolisian sebagai individu yang beragama, sekaligus juga bagian pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum efektif, sehingga kekurangan tersebut mampu diisi oleh prinsip moderasi beragama.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan saran, pendapat, dan pemikiran untuk melahirkan cita-cita penulisan buku ini, semoga semua amal dan kebaikan diterima oleh Allah swt. Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih ini kepada para sivitas akademika di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan dorongan dan inspirasi kepada penulis untuk mewujudkan tulisan ini. Semoga kebaikan tersebut akan menjadi amal saleh yang diterima Allah swt.

Karya ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana yang diharapkan, namun penulis sadar akan firman Allah swt "*Laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha*". Inilah kemampuan yang dimiliki oleh penulis dengan segala keterbatasannya. Kritik dan saran para pembaca sangat penulis harapkan. Hanya kepada Allah penulis bertawakkal, semoga Allah swt memudahkan segala urusan kita dan menunjukkan jalan-Nya yang lebih terbuka, sehingga kita semua berpeluang memperoleh keridaan-Nya. Amin.

Makassar, 17 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
BAB II METODE PENELITIAN.....	9
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	9
B. Lokasi Penelitian	10
C. Populasi dan Sampel Penelitian	10
D. Metode Pengumpulan Data	11
E. Analisis Data.....	12
BAB III HASIL PENELITIAN	13
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	13
1. Fungsi dan Peran	13
2. Dasar Hukum.....	16

3. Kewenangan	18
B. Kriminalitas Geng Motor	23
1. Selayang Pandang Tentang Geng Motor	23
2. Perbuatan Kriminal	29
3. Kriminalitas Geng Motor	34
4. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor	39
C. Diskresi Kepolisian.....	42
1. Pengertian Diskresi	42
2. Diskresi Kepolisian.....	50
3. Sisi Positif dan Negatif Diskresi	57
4. Penyimpangan Diskresi	61
5. Pembatasan Diskresi.....	63
6. Pertimbangan dan Pertanggungjawaban Diskresi	65
7. Faktor Yang Mempengaruhi Diskresi Kepolisian di Lapangan.....	74
8. Penerapan Diskresi Pada Aksi Kriminal Geng Motor	79
9. Efektivitas Penerapan Diskresi Kepolisian.....	88
10. Konsekuensi Dan Moral Dalam Menerapkan Diskresi.....	92
11. Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Dalam Pengambilan Diskresi	95
D. Faktor dan Upaya Pemberantasan Kriminalitas Geng Motor.....	97
1. Faktor Penyebab Aksi Kriminal Anggota Geng Motor	97
2. Upaya Memberantas Kriminalitas Geng Motor	111
E. Moderasi Dalam Diskresi Kepolisian	113
1. Prinsip Diskresi Kepolisian dan Moderasi Beragama.....	113

2. Moderasi Dalam Penerapan Diskresi Kepolisian	118
3. Manfaat Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Masyarakat Multikultural	131
4. Tantangan Moderasi Beragama pada Diskresi Kepolisian	148
BAB IV Penutup	165
A. Kesimpulan.....	165
B. Rekomendasi.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....	168
TENTANG PENULIS	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, kemudian pada Pasal 4 juga menegaskan, “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.¹

Peran aparat kepolisian tersebut dapat dilakukan melalui tindakan diskresi. Diskresi oleh aparat kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*Plichtmatigheids Beginself*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.²

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.³

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,”(2002), Pasal 2 dan Pasal 4.

²Abi Dymond, “Towards a Socio-Technical Understanding of Discretion: A Case Study of Taser and Police Use of Force”, *Policing and Society*, September 16, 2019, 1–15, <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1660338>, hlm. 8.

³Muhammad Ikbāl, “Implementation of Discretion Perspective of Penal Policy (Study of Yogyakarta Police Department),” *Journal of*

Selanjutnya, salah satu yang saat ini menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan adalah geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun *touring* dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Anggota geng motor tersebut adalah anak yang masih bersekolah di bangku sekolah menengah, seperti SMP dan SMA, di mana menurut hukum anak itu masuk kategori anak di bawah umur.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3), yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴

Pengertian geng motor memang identik dengan kekerasan yang belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang,

Indonesian Legal Studies 3, no. 1 (2018): 75–92, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>, hlm. 81.

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012), Pasal 1 Ayat (3).

hingga hobi melakukan aksi perampokan bahkan membunuh.⁵

Geng motor awalnya berkembang di kota Bandung, namun telah berkembang ke banyak daerah, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar bahkan merembes ke daerah-daerah seperti Kediri, Malang, Jombang dan sebagainya.

Aparat kepolisian bisa melakukan diskresi dalam upaya memberantas geng motor. Namun yang menjadi dilema bagi aparat kepolisian adalah anggota geng motor yang melakukan tindak pidana berat seperti penganiayaan dan pembunuhan, sepatutnya tidak bisa dilakukan diskresi karena sifat tindak pidana yang dilakukannya tergolong berat. Sedangkan anggota Geng motor yang melakukan tindak pidana adalah masih tergolong anak, yakni dari umur 12 tahun hingga sebelum mencapai umur 18 tahun.

Dalam perkembangannya, aksi geng motor yang mencapai tindak pidana berat, sulit untuk diterima masyarakat sebagai bentuk kenakalan remaja karena masyarakat sudah merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas sehari-hari. Kerugian yang dialami masyarakat oleh aksi geng motor, bukan hanya dari segi ekonomi, waktu, dan nyawa, tetapi hal ini diperparah dengan terlanggarnya hak asasi untuk hidup bebas dengan aman.

Aparat kepolisian selaku penegak hukum pertama dalam menghadapi geng motor dituntut untuk mampu memberi tindakan tegas. Aparat kepolisian mempunyai

⁵Khaerul Khaerul, Julianto Julianto, and Salmah Salmah, "Studi Kualitatif Geng Motor Anarkis Di Makassar," *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh* 3, no. 1 (2016): 481–490, hlm. 485.

peran penting dalam memberantas geng motor, baik itu dalam hal pencegahan, pembinaan kepada masyarakat, dan perlindungan bagi korban. Namun yang selama ini diterapkan aparat kepolisian dalam menindak anggota geng motor hanya memerintahkan *push-up* dan *skot-jump* kemudian langsung dikembalikan kepada orang tua untuk dibina agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Faktanya, hal tersebut tidak memberi efek jera bagi anggota geng motor karena aksi geng motor semakin marak terjadi, mengingat geng motor juga memiliki organisasi yang teratur, sehingga sulit untuk diberantas. Tindakan kepolisian yang hanya memerintahkan *push-up* dan *skot-jump* kurang mampu memberi perubahan ke arah yang lebih baik bagi anggota geng motor.

Dalam upaya memberantas geng motor ini, aparat kepolisian perlu suatu cara atau metode diskresi yang baru untuk memberi efek jera dan memberi motivasi yang konstruktif. Diskresi ini tidak harus berhenti di tahap penyelidikan dan penyidikan, bahkan harus diperhatikan (*monitoring*) hingga pasca penangkapan untuk melihat perubahan yang terjadi.

Aparat kepolisian harus bisa melihat segala kepentingan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam hal diskresi ini polisi harus memprioritaskan keadilan substantif antara kepentingan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keamanan dan kepentingan anak yang secara psikologi belum bisa membedakan hal baik dan buruk tanpa memberi trauma dan stigma buruk kepada anak. Sehingga kelak diharapkan

dengan adanya upaya diskresi yang tepat oleh aparat kepolisian dapat memberantas dan memberi efek jera bagi anggota geng motor.

Dalam rangka mewujudkan diskresi kepolisian yang efektif dan efisien, maka diperlukan suatu pemicu dalam penerapannya di lapangan. Solusi tersebut adalah pemahaman dan penerapan moderasi beragama. Anggota kepolisian yang merupakan individu yang beragama yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda sangat rawan melakukan kesalahan di lapangan. Hal ini dikarenakan implementasi diskresi sangat bergantung pemahaman individu dan kondisi di lapangan.

Moderasi berasal dari kata moderat. Moderasi mengandung prinsip dasar, yaitu keadilan dan berimbang sangat relevan dengan prinsip penegakan hukum secara universal di dunia. Hadirnya moderasi beragama bagi anggota kepolisian akan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dalam diskresi di lapangan dengan mempertimbangkan segala aspek, seperti kondisi pelaku, kondisi korban, motif pelaku, menghindari konflik kepentingan, dan berlaku adil dan seimbang.⁶

Tiap agama di dunia mengajarkan kepada kebaikan, tidak terkecuali di Indonesia kemudian tiap anggota kepolisian di Indonesia merupakan individu dengan agama mereka masing-masing yang sangat berpengaruh dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buku ini juga akan menjelaskan hubungan moderasi beragama

⁶Republik Indonesia Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

dalam implementasi diskresi kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Fokus pertanyaan atas masalah yang dibahas dari karya ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran diskresi kepolisian dalam memberantas kriminalitas geng motor, baik dalam aspek teori dan penerapan di lapangan?
2. Bagaimana bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor?
3. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas oleh geng motor?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan institusi kepolisian dalam menghadapi kriminalitas geng motor?
5. Bagaimana pengaruh moderasi beragama dalam implementasi diskresi kepolisian dalam memberantas kriminalitas geng motor?

C. Tujuan

Karya ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok pengendara motor secara berkelompok yang biasa disebut geng motor yang dikaitkan dengan prinsip moderasi beragama melalui diskresi kepolisian dan upaya

percepatan pemberantasan kriminalitas geng motor. Adapun hasil dari karya ini ditujukan untuk:

1. Menjadi solusi alternatif dalam memberantas perbuatan kriminal yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh geng motor;
2. Menjadi sumber rujukan pengetahuan yang menjelaskan fenomena kriminal oleh geng motor;
3. Menjadi bahan pertimbangan perbaikan dan peningkatan kinerja kepolisian dalam menghadapi perbuatan kriminal dengan efektif dan efisien.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Karya ini merupakan penelitian normatif empiris yang bertujuan memberikan deskripsi dan penjelasan terhadap fenomena kriminalitas geng motor. Bagian penelitian normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perkembangan hukum di dunia yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Selanjutnya, bagian penelitian empiris adalah melihat dan mengobservasi reaksi masyarakat sebagai suatu kenyataan di lapangan.⁷

⁷Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 15-35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>, hlm. 20.

Pendekatan yang digunakan dalam karya ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dikombinasikan dengan fenomena yang terjadi. Karya ini bertitik tolak dari data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan ditambah data regulasi yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian atas karya ini dilakukan di wilayah Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) yaitu Polsekta Biringkanaya, Polsekta Rappocini, Polsekta Mamajang, Polsekta Makassar, Polsekta Panakkukang, dan Polsekta Tamalate. Kemudian, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar sebagai representasi dari wilayah yang marak terjadi perbuatan kriminal oleh geng motor.⁸

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian karya ini adalah petugas Kepolisian Sektor Kecamatan (Polsek) hingga Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan Polres Kab. Gowa. Sampel dari penelitian ini adalah beberapa orang yang dianggap mewakili segala setiap elemen populasi. Contohnya, polisi bagian reserse kriminal dan bagian pidana umum di Polsek dan Polrestabes Kota Makassar. Selain itu,

⁸Anonim, "Kejahatan Geng Motor Di Makassar," Koran Tempo.com, 2015, Diakses pada 20 Juni 2020.

anggota geng motor yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar juga akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Penarikan sampel penelitian karya ini dengan cara *purposive sampling*. Cara penarikan sampel penelitian dengan sistem *purposive sampling* ini ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan informasi/data yang diperlukan untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah.⁹

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam karya ini, digunakan dengan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*literature review*), dengan mengkaji semua literatur yang relevan dalam penelitian ini.
2. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan ruang lingkup masalah yang dibahas seperti kepolisian, dan anggota geng motor yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

⁹Lawrence A Palinkas et al., "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research," *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42, no. 5 (2015): 533-544, <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>, hlm. 540.

3. Kuisisioner, yaitu peneliti membagikan kuisisioner berupa pertanyaan tertutup kepada responden yang berasal dari sampel penelitian.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh di lapangan akan digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk angka kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Selanjutnya, data yang diperoleh juga akan dideskripsikan dan dijelaskan secara kualitatif, seperti wawancara dan kuisisioner terhadap fenomena kriminal geng motor di lapangan.¹⁰ Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan dan tepat dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁰W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Methods, Qualitative And Quantitative Approaches*, Edisi Ketujuh (Boston: Pearson Education, Inc., 2011), hlm. 421.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Fungsi dan Peran

Hal yang perlu dipahami di awal adalah perbedaan kepolisian dan polisi. Pengertian kepolisian dan polisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan definisi polisi merujuk pada Pasal 1 Angka 2 yang menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, jelas terlihat perbedaan antara Kepolisian yang merupakan suatu lembaga sedangkan polisi adalah anggota lembaga tersebut, sehingga

ketika kita membicarakan tentang kepolisian, maka otomatis kita juga membahas anggota polisi di dalamnya.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *Politie Overzee*, pengertian *politie* mencakup organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat dan tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.¹¹

Selanjutnya istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh UU diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Kemudian, sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.¹²

Peran kepolisian sebagai lembaga penjaga keamanan dalam negeri di Indonesia dapat dibagi ke dalam 2 jenis,

¹¹Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, Dan Reformasi POLRI* (Surabaya, 2014), hlm. 55.

¹²Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri Dan Good Governance* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2007), hlm. 31.

yaitu peran eksekutif dan peran publik. Kepolisian sebagai bagian dari eksekutif dapat dilihat dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari pemerintahan yang dibawah perintah seorang Presiden. Lembaga Kepolisian dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), di mana Kapolri ditunjuk oleh Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa polisi dan kepolisian merupakan alat Negara yang digunakan oleh pemerintah dalam memberi jaminan keamanan kepada masyarakat.

Sedangkan, peran publik adalah peran kepolisian dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tujuan dan fungsi lembaga kepolisian yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, seyogyanya kepolisian senantiasa selalu berada di samping. Maksud dari hal tersebut adalah kepolisian harus saling bahu-membahu dan tolong-menolong dengan masyarakat dengan bersikap setara dengan masyarakat biasa, tidak menonjolkan sikap angkuh dan sombong di depan masyarakat. Cara ini merupakan bentuk terbaik yang dapat dilakukan anggota polisi dalam mengambil hati dan kepercayaan masyarakat karena benar-benar bersifat mengayomi dan memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam hal memberikan perlindungan dan penegakan hukum, kepolisian harus bersikap tegas dan mengambil posisi di depan. Maksudnya adalah memberikan perlindungan, seperti menjaga keamanan suatu daerah dari ancaman kejahatan terorisme atau kejahatan lain kemudian menegakkan hukum dengan menindak semua orang yang bersalah tanpa diskriminasi merupakan tugas kepolisian dengan berada di depan untuk melindungi masyarakat. Setiap anggota polisi harus siap jiwa dan raga dalam menjalankan tugasnya dan melindungi masyarakat, itulah makna sesungguhnya dari posisi di depan masyarakat.

Peran dan fungsi kepolisian tersebut telah sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dasar Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian mempunyai dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1987 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pegangan utama. Undang-undang tersebut dibentuk dengan

dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan lainnya, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang.

Selain itu, dalam mengoptimalkan kinerjanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penegakan hukum, kepolisian dapat membentuk peraturan teknis berupa Peraturan Kepala Kepolisian RI (Peraturan Kapolri) dan peraturan di bawahnya yang berlaku di internal kepolisian.

Dasar hukum di atas bersifat sangat penting bagi kepolisian sebagai hukum bagi kepolisian dalam

¹³Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," Pub. L. No. 2 Tahun 2002, 2 (2002), Bagian Mengingat.

menjalankan tugasnya. Menurut Soebroto Brotodiredjo, mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.¹⁴

3. Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dengan ciri khas suatu Negara, yaitu kekuasaan yang memiliki kewenangan.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁶ Selain itu, kewenangan adalah hak individu untuk melakukan tindakan dengan batas-batas tertentu.¹⁷ Pengertian tersebut menempatkan bahwa kepolisian dan

¹⁴Edward Syahperenong Soebroto Brotodiredjo, Sitompul, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, First (Bandung: Tarsito Pubhliser, 1985), hlm. 78.

¹⁵Nandang Alamsah Deliarnoor. et.al, *Teori & Praktek Kewenangan*, First Edit (Yogyakarta: PANDIVA BUKU, 2017).

¹⁶"Arti Kata Kewenangan," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2019.

¹⁷Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan Dan Kewenangan," Kompasiana.com, 2015, <https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>.

anggota polisi memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan dengan batasan tertentu.

Wewenang kepolisian telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut adalah:

- a. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam;
 - 5) Persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 6) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 7) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 8) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- 9) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 10) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 11) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 12) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 13) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 14) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- b. Menurut Pasal 15 Ayat (2) Kepolisian Negara RI berwenang:
- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - 10) Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
 - 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- c. Pasal 16 Ayat (1), yaitu dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara RI berwenang untuk:
- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan-penyidik pegawai

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d. Pasal 16 Ayat (2), yaitu tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

B. Kriminalitas Geng Motor

1. Selayang Pandang Tentang Geng Motor

Berbagai bentuk ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat dapat saja terjadi. Salah satu ancaman terbaru adalah geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang memiliki kegemaran berkendara sepeda motor secara bersama-sama dengan tujuan konvoi atau

touring.¹⁸ Definisi geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kebiasaan yang sama dari beberapa orang, namun berangsur menjadi geng motor yang meresahkan masyarakat.¹⁹

Arti dari geng motor telah melekat dengan kekerasan, hal tersebut disebabkan perbuatan geng motor yang tergolong kriminal, seperti perampokan, penganiyaan, hingga pembunuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI), kata “Geng” diartikan sebagai kelompok remaja karena kesamaan latar belakang sosial, daerah dan lain sebagainya. *Geng* juga diartikan sebagai “gerombolan”.²⁰ Geng motor adalah kumpulan orang yang memiliki kendaraan dan memiliki hobi yang sama, namun seiring berjalannya waktu, berubah menjadi melakukan perbuatan kriminal yang merugikan dan membuat resah warga sekitar.²¹

Kiranya perlu dibedakan antara kelompok Geng motor dengan Klub motor. Geng motor adalah kumpulan orang-orang pecinta motor yang doyan kebut-kebutan, tanpa

¹⁸Jauhar, “Geng Motor Di Indonesia Perspektif Fenomenologi,” Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan 10, no. 3 (2018): 58–59, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>, hlm. 59.

¹⁹Muhammad Jufri, “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu,” E-Jurnal Katalogis 3, no. 12 (2015): 76–84, hlm. 80.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata Gerombolan,” 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gerombolan>.

²¹Aswin, “Diskusi Tentang Geng Motor,” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, <http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motorkenakalan-remaja.html#.VFFeFBVcnb5M> ,.

membedakan jenis motor yang dikendarai. Sedangkan, klub motor biasanya mengusung merek tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti HDC (*Harley Davidson Club*), *Scooter* (kelompok pecinta vespa), kelompok Honda, Kelompok Suzuki, Mio, dan lain-lain. Ada komunitas bernama "*Brotherhood*" sebagai kelompok pecinta motor besar tua. Tapi kalau soal aksi jalanan, semuanya sama saja. Kebanyakan sama-sama merasa jadi raja jalanan, tak mau didahului, apalagi disalip oleh pengendara lain.²²

Pemuda memiliki potensi-potensi yang melekat pada dirinya dan sangat penting artinya sebagai sumber daya insani. Oleh karena itu, potensi positif yang dimiliki generasi muda harus dikembangkan, dalam arti pengembangan dan pembinaannya hendaknya harus sesuai dengan asas, arah dan tujuan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.²³

Dalam perkembangannya, adanya perkumpulan-perkumpulan pecinta motor tersebut telah bergeser ke arah perilaku yang menyimpang, bahkan tidak sedikit yang berperilaku negatif. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada aksi-aksi dari aktivitas komunitas anak muda dalam perkumpulan motor tercoreng oleh ulah dari beberapa

²²Mulyani Hasan, "Geng Motor Di Bandung," 2007, mulyanihasan.wordpress.com.

²³Sambas Nandang, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 112.

anggota komunitas yang menyebut dirinya sebagai “geng motor”.²⁴

Geng motor merupakan bagian dari komunitas motor, namun yang dengan komunitas motor itu sendiri, geng motor merupakan bagian dari komunitas dengan tujuan cenderung orientasinya ke arah negatif, antara lain bertindak kekacauan, anarkis, serta melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum sehingga meresahkan masyarakat serta mendapat cap negatif dari masyarakat dan dari media dikarenakan oleh perilaku mereka.²⁵

Perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh anggota geng motor tersebut sangat meresahkan masyarakat, karena dianggap menyalahi norma-norma sosial. Beberapa bentuk perilaku tersebut antara lain berkendara dengan kecepatan tinggi saat mengendarai motor baik pada waktu siang maupun malam hari, melakukan balapan motor liar atau istilahnya “*trek-trekan*” di jalanan, melakukan tindakan curanmor, melakukan pengrusakan fasilitas-fasilitas umum dan sampai tawuran dengan anggota komunitas motor lain.²⁶

Geng motor yang awalnya berasal dari Kota Bandung kemudian menyebar ke beberapa daerah lain, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan Makassar di Indonesia

²⁴Nandang, hlm. 124.

²⁵Nandang, hlm. 121.

²⁶Nandang, hlm. 140.

Timur. Perkembangan tersebut terus terjadi hingga daerah-daerah kecil seperti kabupaten-kabupaten di Indonesia.²⁷

Di sisi lain, menjadi suatu hal yang ironis di mana anggota geng motor yang melakukan perbuatan kriminal ini sebagian besar merupakan remaja hingga yang termasuk kategori anak. Perbuatan kriminal adalah anggota geng motor tersebut adalah anak yang rata-rata masih bersekolah di bangku sekolah menengah, seperti Sekolah Tingkat Lanjut Pertama (SLTP) dan Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA).²⁸

Hal ini didukung dengan hasil laporan penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2017 mengenai fenomena geng motor di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Kota Bandung dan Cirebon yang menemukan bahwa banyak berita di media, seperti media cetak dan elektronik yang memberitakan aksi kriminal yang dilakukan sekelompok pengendara motor. Kota Bandung dan Cirebon merupakan daerah dengan jumlah pemberitaan terbanyak atas kasus kriminal yang dilakukan geng motor. Berbagai kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor telah membuat keresahan luar biasa bagi warga sekitar yang membuat mereka takut untuk beraktivitas, tidak hanya pada malam hari, tetapi juga hal tersebut biasa terjadi di siang hari di mana keramaian terjadi. Fakta tersebut menunjukkan betapa sadis dan nekat,

²⁷Purwanti Hadisiwi; Jenny Ratna Suminar, "Konstruksi Sosial Anggota Geng Motor Di Kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 1 (2013): 1–10, <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n1.1>, hlm. 8.

²⁸Suminar, hlm. 7.

komplotan geng motor yang tidak takut untuk melukai bahkan membunuh korbannya.²⁹

Fakta yang turut melibatkan anak dalam kriminalitas geng motor tersebut mengharuskan anak terseret dalam proses penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pada Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana secara psikologi, pikirannya masih belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga melakukan sesuatu karena rasa ingin tahu yang besar.³⁰ Kemungkinan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pelaku sekaligus korban di mana anak melakukan tindak pidana berdasarkan rayuan, pengaruh, atau paksaan dari orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Orang dewasa bisa memanfaatkan anak untuk kepentingannya, dengan memberi contoh buruk atau mempengaruhi pikiran anak yang masih lugu dan mudah dipengaruhi.

Dalam perkembangannya, aksi geng motor yang mencapai tindak pidana berat, sulit untuk diterima

²⁹Irmayani; Badrun Susantyo; B. Mujiyadi; Anwar Sitepu Togiaratua Nainggolan; Sugiyanto; Muslim Sabarisman, "Fenomena Geng Motor (Studi Di Beberapa Kota Di Jawa Barat)" (Jakarta, 2017).

³⁰Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

masyarakat sebagai bentuk kenakalan remaja karena masyarakat sudah merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas sehari-hari. Masyarakat mengalami banyak kerugian yang diakibatkan oleh aksi kriminal geng motor, mulai dari kerugian ekonomi, waktu, dan nyawa, bahkan diperburuk dengan ketidaknyamanan masyarakat untuk hidup aman dan nyaman.

Anak yang seyogyanya dilindungi, sekarang banyak melakukan perbuatan kriminal yang tergolong berat, sehingga membuat kita harus melakukan restrukturisasi pengertian anak. Bukan isu lagi bahwa faktor perkembangan zaman pada aspek kehidupan menyumbangkan pengaruh terbesar bagi perubahan anak saat ini, hingga berani melakukan aksi kriminal dalam geng motor. Akibatnya, paradigma masyarakat tentang kenakalan remaja oleh geng motor perlahan menjadi suatu bentuk keresahan dengan tuntutan untuk membarantas geng motor.³¹

2. Perbuatan Kriminal

Istilah kriminal berasal dari kata *crime* pada bahasa Inggris. Dalam perkembangannya, istilah kriminal berubah menjadi banyak istilah yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik. Dalam buku ini, peneliti lebih memilih memakai istilah

³¹Susan Young, Ben Greer, and Richard Church, "Juvenile Delinquency, Welfare, Justice and Therapeutic Interventions: A Global Perspective," *BJPsych Bulletin* 41, no. 1 (2017): 21–29, <https://doi.org/DOI: 10.1192/pb.bp.115.052274>, hlm. 24.

tindak pidana dalam menjelaskan arti dari perbuatan tersebut.

Perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik merupakan istilah yang secara resmi dipakai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tersebut berasal dari pembentuk undang-undang kita yang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah yang digunakan KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.

Istilah *Strafbaar feit* mengakomodir tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diartikan dengan pidana dan hukum. Istilah *baar* diterjemahkan dengan dapat dan bisa. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³²

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah SWT, dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan syarak tersebut terkadang dapat berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³³

Simons, Profesor ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, berpendapat tentang terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurut beliau, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

³³Achmad Ali, *Yusril Versus Kriminal Justice System* (Makassar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), hlm. 48.

kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁴ Selanjutnya, Simons juga berpendapat *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah diperbuatnya kemudian oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang harus mendapat hukuman.³⁵

Vos berpendapat tentang definisi dari *strafbaar feit* adalah kelakuan atau model perilaku manusia, yang oleh Undang-Undang berakibat pidana.³⁶ Van Hattum juga berpendapat bahwa pernyataan *strafbaar feit* secara eksplisit wajib diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan akibat telah melakukan tindakan semacam yang membuat seseorang menjadi sidersalah dan dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.³⁷

Selanjutnya, Moeljatno memiliki definisi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi, berupa pidana tertentu, bagi siapa saja individu yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.

Selain itu, E.Utrecht beranggapan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan istilah peristiwa pidana yang sering

³⁴Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 224.

³⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

³⁶Farid, *Hukum Pidana 1*, hlm. 280.

³⁷Farid, hlm. 184.

juga ia sebut delik. Hal ini disebabkan oleh peristiwa itu adalah suatu perbuatan *handelen* atau *doen positif* atau tindakan yang mengakibatkan kelalaian *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).³⁸

Perkembangan hukum pidana di dunia, telah berkembang sangat pesat hingga menjabarkan hukum pidana ke dalam beberapa pandangan. Ada 2 pandangan besar tentang unsur-unsur tindak pidana yang terkenal dalam berbagai literatur hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu sudut pandang yang melihat syarat adanya pidana harus diperoleh oleh dua hal, yaitu sifat dan perbuatan. Sudut pandang ini memberikan dasar-dasar pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah terdapat didalamnya poin-poin perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*).³⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁴⁰

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;

³⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

³⁹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012), hlm. 38.

⁴⁰Ilyas, hlm. 55.

- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *kriminal act*, dan *kriminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah tindakan sebagai sesuatu delik adalah cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana tersebut dengan unsur pada peraturan perundang-undangan pidana yang mengaturnya. Menurut sudut pandang dualistis, unsur-unsur delik adalah:⁴¹

- a. Perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan delik pada peraturan perundang-undangan;
- b. Ditemukan unsur melawan hukum;
- c. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar.

Berdasarkan ulasan dari sarjana hukum tersebut, peneliti berpendapat bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang bersifat melawan hukum di mana perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian akibat perbuatan tersebut, maka diberlakukan sanksi terhadapnya.

⁴¹Ilyas, hlm. 43.

3. Kriminalitas Geng Motor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan tentang kejahatan atau tindak pidana geng motor, sehingga kepolisian menginventarisir kejahatan yang dilakukan geng motor berdasarkan jenis tindak pidana yang ada pada KUHP, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan.

Salah satu daerah yang ramai dengan tindak kriminal oleh geng motor adalah Kota Makassar. Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yang berada pada ketinggian antara 0-25 M dari permukaan laut. Pada tahun 2011, penduduk Kota Makassar yang tercatat sebanyak 1.523.520 jiwa di mana terbagi ke dalam 811.449 laki-laki dan 862.458 perempuan dengan pertumbuhan rata-rata 1,65% lebih tiap tahunnya. Warga Kota Makassar memiliki beberapa etnis suku daerah yang hidup berdampingan secara damai, yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar.

Berikut data tentang kecamatan dan luas wilayah di Kota Makassar, yaitu:

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Tamalanrea	31,84
2	Biringkanaya	48,22
3	Manggala	24,14

**MODERASI BERAGAMA PADA DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
MEMBERANTAS KRIMINALITAS GENG MOTOR**

4	Panakkukang	17,05
5	Tallo	5,83
6	Ujung Tanah	5,94
7	Bontoala	2,10
8	Wajo	1,99
9	Ujung Pandang	2,63
10	Makassar	2,52
11	Rappocini	9,23
12	Tamalate	20,21
13	Mamajang	2,25
14	Mariso	1,82
Total		175,77

Sumber : Data BPS Kota Makassar 2015

Berdasarkan data dari Polrestabes Kota Makassar, terdapat 5 Kecamatan yang rawan dengan aksi kriminal anggota geng motor di kota Makassar, yaitu Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Biringkanaya. Aksi kriminal merupakan peristiwa sosial yang memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat yang harus

diberantas. Sama halnya dengan kriminalitas yang dilakukan oleh anggota geng motor yang dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa penting atau fenomena yang patut dicegah dan diberantas keberadaannya.

Selanjutnya adalah data tentang tindak kejahatan yang sering terjadi di Kota Makassar pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tindak Pidana Lapor dan Selesai Tahun 2012

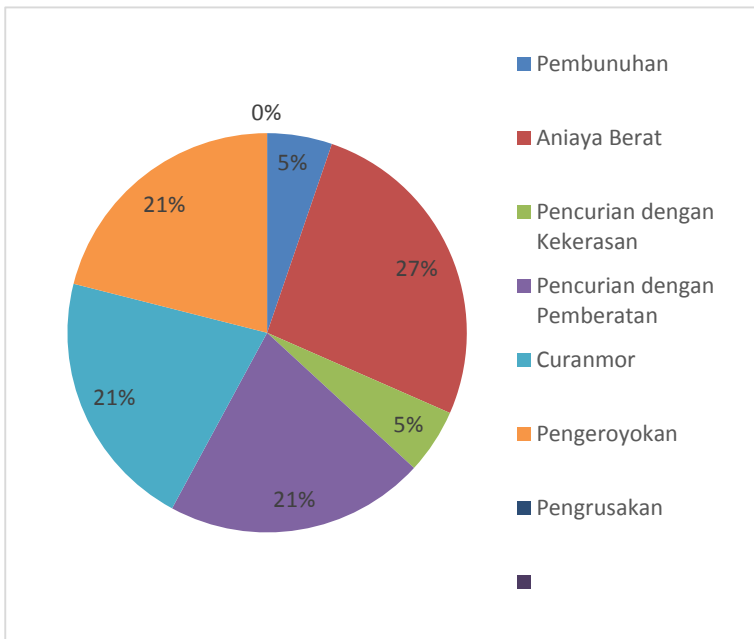
Jenis Tindak Pidana	Lapor	Selesai
Pembunuhan	18	18
Aniaya Berat	423	333
Curi Keras	215	123
Curi Berat	426	327
Curi Biasa	369	195
Perkosaan	23	12
Senjata Tajam	407	364
Aniaya Ringan	359	296
Miras	-	-
Rusak Fasilitas Umum	1	-
Jumlah	2.241	1.168

Sumber : Unit Reskrim Polrestabes Makassar, 2015

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah tindak pidana lapor dan selesai tidak sama, kecuali tindak pidana pembunuhan. Jumlah tindak pidana selesai lebih sedikit dari pada jumlah tindak pidana yang dilaporkan. Ini membuktikan bahwa kepolisian tidak bisa menyelesaikan semua laporan kejahatan yang masuk terjadi.

Hal lain yang dapat disimpulkan adalah tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan berat dan penggunaan senjata tajam dari jumlah laporan yang masuk pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di kota Makassar di mana geng motor sering melakukan pembegalan atau pencurian atau tindak pidana lain menggunakan senjata tajam dan penganiayaan terhadap korbannya.

Selanjutnya, data perkembangan pada tahun 2015 tentang tindak kriminal yang sering terjadi di Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Persentase Tindak Kriminal Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat 2 poin penting. Pertama adalah, sepanjang tahun 2015, tindak pidana terjadi dalam berbagai macam aksi kriminal dengan 8 kategori tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan berat menempati urutan pertama dengan persentase 27% kemudian disusul tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pengeroyokan, dan pencurian dengan kekerasan memiliki persentase yang sama, yaitu sebanyak 21%. Kedua, adalah tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2015 dapat dikatakan merata pada tiap bulannya.

Data di atas menunjukkan banyaknya tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar. IPTU Ismail selaku bagian Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar menyampaikan

bahwa hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh kelompok geng motor.⁴²

Hal tersebut sesuai dengan maraknya pembicaraan dan isu tentang geng motor sepanjang tahun 2015 di Kota Makassar. Masyarakat menjadi takut dan merasa terteror oleh aksi kriminal geng motor karena tidak hanya pada malam hari, namun juga terjadi siang hari. Pihak yang paling intens adalah pencurian dan kekerasan terhadap Pedagang dan minimarket, bahkan sampai menelan korban jiwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pemberantasan kriminalitas geng motor adalah sesuatu yang penting dan mendesak.

4. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor

Aparat kepolisian selaku penegak hukum pertama dalam menghadapi Geng motor dituntut untuk mampu memberi tindakan tegas. Aparat kepolisian mempunyai peran penting dalam memberantas Geng motor, baik itu dalam hal pencegahan, pembinaan kepada masyarakat, dan perlindungan bagi korban. Namun, yang selama ini diterapkan aparat kepolisian dalam menindak anggota geng motor hanya memerintahkan *push-up* dan *skot-jump* kemudian langsung diberikan kembali kepada orang tua

⁴²IPTU Ismail, "Hasil Wawancara" (2015), pada 15 November 2015.

mereka agar dilakukan pembinaan dan berjanji tidak melakukan kembali perbuatan kriminal mereka.⁴³

Aparat kepolisian bisa melakukan diskresi dalam upaya memberantas geng motor. Namun yang menjadi dilema bagi aparat kepolisian adalah anggota Geng motor yang melakukan tindak pidana berat seperti penganiayaan dan pembunuhan, sepatutnya tidak bisa dilakukan diskresi karena sifat tindak pidana yang dilakukannya tergolong berat. Sedangkan, anggota geng motor yang melakukan tindak pidana adalah masih tergolong anak, yakni dari umur 12 tahun hingga sebelum mencapai umur 18 tahun.⁴⁴

Tindakan kepolisian yang terkesan lunak kepada anggota geng motor nyatanya tidak membuat kapok anggota geng motor karena aksi mereka semakin marak terjadi, mengingat geng motor juga memiliki organisasi yang teratur, sehingga sulit untuk diberantas. Tindakan kepolisian yang hanya memerintahkan *push-up* dan *skot-jump* kurang mampu memberi perubahan ke arah yang lebih baik bagi anggota geng motor.

Di sisi lain, aparat kepolisian tetap harus melindungi hak-hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam

⁴³Endro Winarno et al., "Kebijakan Proaktif Berbasis Hak Penerapan Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal PKS* 14, no. 3 (2015): 263–278, hlm. 270.

⁴⁴Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1/PUU-VIII/2010" (2010).

upaya memberantas geng motor ini, aparat kepolisian perlu suatu cara atau metode diskresi yang baru untuk memberi efek jera dan memberi motivasi yang konstruktif. Diskresi ini tidak harus berhenti di tahap penyelidikan dan penyidikan, bahkan harus diperhatikan (*monitoring*) hingga pasca penangkapan untuk melihat perubahan yang terjadi. Kemudian karena anggota geng motor yang merupakan anak di bawah umur maka dalam menindak tegas para anggota geng motor diperlukan suatu cara yang kreatif dan bijak dari aparat kepolisian.

Aparat kepolisian harus bisa melihat segala kepentingan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam hal diskresi ini polisi harus memprioritaskan keadilan substantif antara kepentingan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keamanan dan kepentingan anak yang secara psikologi belum bisa membedakan hal baik dan buruk tanpa memberi trauma dan stigma buruk kepada anak. Sehingga kelak diharapkan dengan adanya upaya diskresi yang tepat oleh aparat kepolisian dapat memberantas dan memberi efek jera bagi anggota geng motor.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting mengetahui faktor-faktor melatarbelakangi aksi kriminalitas geng motor dan bagaimana respon yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas geng motor. Hal tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji tindakan kepolisian baik itu dalam bentuk diskresi atau tindakan lain kemudian mengkaji dan mencari solusi diskresi yang bersifat responsif guna mencapai tindakan diskresi yang merangkul

kepentingan masyarakat umum serta memberi efek jera bagi anggota geng motor dan masyarakat luas.

C. Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Diskresi

Pengertian diskresi menurut *Black Law Dictionary*, merupakan bahasa Belanda dari “*Discretionair*”, dengan definisi sebagai suatu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, melainkan hanya berdasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan tentang keadilan.⁴⁵

Berdasarkan *Black Law Dictionary (Eleventh Edition)* oleh Bryan A. Garner, terdapat beberapa pengertian diskresi, yaitu:⁴⁶

- a. *Wise conduct and management*, yang berarti tindakan yang bijak dan teratur;
- b. *Individual judgement; power of free decision-making*, yang berarti penilaian individu atau kebebasan dalam membuat keputusan;
- c. *The capacity of distinguish between right and wrong, sufficient to make a person responsible for his or her own actions*, yang berarti kemampuan untuk menilai benar dan salah,

⁴⁵Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2015), hlm. 45.

⁴⁶Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ke Sebelas, 2019, hlm. 146.

khususnya membuat seseorang bertanggungjawab atas tindakannya.

- d. *A publik official's power or right to act in certain and conscience, often in an official or representative capacity. Also termed discretionary power*, yang berarti kekuasaan seorang pejabat publik atau hak untuk bertindak tertentu dan hati nurani, seringkali dalam kapasitas resmi atau perwakilan juga disebut daya diskresi.
- e. *Administrative discretion. A publik official's or agency's power to exercise judgement in the discharge of its duties (case admin. Law and procedure*, yang berarti kebijaksanaan administratif. Hukum dan prosedur seorang pejabat publik atau kekuasaan lembaga untuk melakukan penilaian di dalam tugasnya.

Berikut ini merupakan beberapa definisi diskresi menurut para pakar:

- a. Kamus hukum susunan Simorangkir, menyatakan bahwa diskresi adalah kebebasan memutuskan tindak lanjut dalam setiap kondisi dan peristiwa yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁴⁷
- b. Kenneth Culp Davis dalam "*The Encyclopedia of Police Science*", mendefinisikan diskresi sebagai *the capacity of police officer to select from among*

⁴⁷Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 59.

a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties. Kenneth berpendapat bahwa diskresi diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan, baik legal maupun illegal. Dengan kata lain, Kenneth Culp Davis mengartikan bahwa diskresi adalah kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi.⁴⁸

- c. Mengikuti teori atau doktrin dari J.H.A. Logeman dalam bukunya "*Over De Theorie van een Stellig staatsrecht*", jabatan itu langgeng (*duurzaam*) sedang pejabat (*ambtsdrager*) datang silih berganti.⁴⁹ Jabatan (*het ambt*) selaku subjek hukum (*rechtssubject*) tidak dapat melaksanakan dirinya, maka jabatan diwakili manusia pribadi (*natuurlijke person*), yakni pejabat pemerintahan (*amtsdrager*). Hanya pejabat yang dapat melakukan atau menggunakan kewenangan yang melampaui kewenangan jabatannya, bukan jabatan *ansich*. Ketika terjadi penggunaan kewenangan atau diskresi yang melintasi (melampaui) kewenangan jabatan, maka hal tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum (*onrechmatig*). Hukum tidak dapat menegakkan

⁴⁸Aryanto Sutadi, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan* (Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013), hlm. 27.

⁴⁹Logemann JHA, *Over De Theorie van Een Stellig Staatsrecht* (Leiden: Leiden Universitaire Pers, 1948), hlm. 28.

dirinya sendiri, melainkan hukum itu harus ditegakkan oleh pejabat penyelenggara pemerintahan dalam arti luas.⁵⁰

- d. Selanjutnya, Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa : “*discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁵¹
- e. Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁵²
- f. Gayus T. Lumbun mendefinisikan diskresi sebagai berikut : “Diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan UU, dengan tiga syarat yakni, demi kepentingan

⁵⁰Tatiek Sri Djatmiati Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* (UGM Press, 2011), hlm. 49.

⁵¹Faal M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), hlm. 65.

⁵²Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), hlm. 79.

umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)".⁵³

- g. Gayus T. Lumbun juga menjelaskan bahwa individu dikatakan melanggar hukum karena melakukan diskresi secara hukum, namun secara prinsip, individu tersebut tidak melawan hukum karena mementingkan kepentingan publik. Hal itu disebut sebagai *instant decision* (keputusan tanpa rencana). Dengan demikian tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, diskresi haruslah dilihat sebagai suatu upaya untuk mencari solusi (penyelesaian masalah) yang tidak menimbulkan masalah baru, termasuk ketidakadilan dan perilaku koruptif oleh petugas (Hakim Agung MA-RI Gayus Lumbun, dalam seminar Kopolnas 19 September 2012, Jakarta).⁵⁴
- h. Ronald Dworkin dan H.L.A. Hart menyebut diskresi sebagai "lubang di dalam donat". Diskresi adalah wilayah kosong di tengah-tengah cincin yang berisikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Kebebasan untuk menentukan pilihan adalah sisi yang paling kuat dari suatu diskresi. Sisi lain, diskresi adalah suatu situasi di mana peraturan (*rules*) tidak berjalan

⁵³Yanata Putra Febriyan, "Tesis: Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian" (Makassar, 2013), hlm. 16.

⁵⁴Sutadi, hlm. 28.

namun petugas polisi melakukan penilaian secara individual (*individual judgement*).⁵⁵

- i. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan atau usaha untuk memberantas kejahatan, yaitu dengan dilakukannya diskresi yang pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan sosial demi melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁶
- j. Menurut Anthon F. Susanto bahwa diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak, mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar bagi pengambil diskresi.⁵⁷
- k. Menurut Thomas Becker dan David L. Carter bahwa:⁵⁸

“Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. Keputusan ini

⁵⁵Sutadi, hlm. 29.

⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 2.

⁵⁷Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 98.

⁵⁸Susanto, hlm. 110.

merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengizinkan lebih banyak pengambilan diskresi”.

- l. Diskresi bagi aparat kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU dalam menjalankan dan mewujudkan keamanan juga ketertiban masyarakat. Menurut Banker, seperti yang dikutip oleh Kunarto menyatakan bahwa diskresi kepolisian takkan pernah dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan.⁵⁹
- m. Sementara, Ru Bailey mengemukakan bahwa yang mempengaruhi implementasi diskresi itu berasal dari aparat yang akan mengambil tindakan. Faktor yang biasanya dominan adalah lama tugas, tinggi rendahnya pangkat atau jabatan, tingkat frustrasi terhadap penundaan jabatan. Rendahnya pengetahuan juga berpengaruh terhadap kualitas putusan untuk bertindak bagi aparat kepolisian tersebut.⁶⁰
- n. Pengertian diskresi yang dikutip oleh Aryanto Sutadi meliputi:⁶¹

⁵⁹Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal Press, 1997), hlm. 27.

⁶⁰Kunarto, hlm. 208.

⁶¹Aryanto, “The Discussion About Discretion,” 2013. Diakses pada 24 Juni 2020.

- 1) Diskresi sebagai *judgement* (pertimbangan/keputusan). Diskresi adalah lawan dari suatu kepatuhan yang rutin dan menjadi kebiasaan. Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan untuk melakukannya dengan cara yang tidak dapat diprediksi.
- 2) Diskresi sebagai *choice* (pilihan). Diskresi melibatkan kontribusi secara personal, pertimbangan, menerapkan otonomi dan solusi secara individual. Diskresi adalah suatu keberanian untuk membuat keputusan, untuk mendapatkan input secara individual, mengikuti hati nurani petugas walaupun di kemudian hari keputusan tersebut barangkali dibatalkan oleh atasan.
- 3) Diskresi sebagai *discernment* (ketajaman). Diskresi bukanlah berarti memuat pilihan-pilihan yang aman atau mudah. Diskresi adalah membuat keputusan yang baik, tepat dan tajam yang lahir dari kebijaksanaan (*wisdom*)
- 4) Diskresi sebagai kebebasan (*liberty*). Diskresi adalah bukanlah situasi di mana hukum telah berakhir, diskresi adalah suatu ijin untuk bertindak sebagai petugas yang memiliki kebebasan dan posisi yang setara. Yang bersangkutan kemudian menggunakan ijin tersebut untuk memperluas hak-hak dan

kewajiban warga masyarakat sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak yang tak dapat diganggu gugat (*inalienable rights*).

- 5) Diskresi sebagai lisensi (*license*). Diskresi adalah lawan dari harapan-harapan yang bersifat standar. Ia adalah suatu *privilege* untuk bertindak tidak sama dengan peraturan, untuk berbeda pilihan dengan atasan, tidak melulu taat asas, tanpa harus mencederai peraturan serta tanpa harus menghilangkan kepercayaan dari atasan serta masyarakat. Lisensi ini harus mengikutsertakan akuntabilitas yang tak harus diakui secara formal.

2. Diskresi Kepolisian

Polisi memiliki peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus sebagai petarung dalam melawan perbuatan pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah pada bidang pemerintahan pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang diperkuat pada klausul Pasal 4 yang menegaskan bahwa institusi kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin hak asasi masyarakat terpenuhi dengan baik.

Polisi dapat melakukan peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dengan melakukan perbuatan diskresi. Diskresi yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan yang bersumber pada prinsip kewajiban umum kepolisian (*Plichtmatigheids Beginself*) yang berarti suatu prinsip yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu menurut penilaiannya sendiri, dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁶²

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yaitu:

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Hal ini dapat diartikan bahwa peran seorang anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, seyogyanya mampu mengambil suatu keputusan yang merupakan wujud kebijaksanaan yang tidak mengakibatkan kekacauan, tetapi justru menciptakan

⁶²Krisnaptik, “Diskresi Kepolisian,” accessed June 16, 2020, <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/> Krisnaptik Diskresi Kepolisian.

rasa aman, perlindungan, rasa nyaman, dan ketertiban umum yang baik.

Jika ditinjau dari aspek organisasi, maka untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian, termasuk melakukan diskresi, institusi kepolisian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶³

- a. Memiliki kekuasaan kepolisian (*police power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan Undang-Undang yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat. Kekuasaan kepolisian meliputi kewenangan untuk menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang pada umumnya membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat.
- b. Pelaksanaan tugas kepolisian dengan mengutamakan pendekatan operasional yang melibatkan semua anggota dalam kegiatan operasional. Oleh karena itu, organisasi kepolisian lebih banyak di dalam unsur operasional dari pada non-operasional. Konsekuensi dari hal tersebut, agar dapat melaksanakan tugasnya, maka setiap anggota polisi diberikan kewenangan umum kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁶³Sutadi, hlm. 78.

- c. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa dalam membantu menjalankan tugas pokok petugas polisi, maka diberi kewenangan dan dasar hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan diskresi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yaitu:
- 1) Pasal 15 Ayat (2) huruf (k), yaitu Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perUUan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
 - 2) Pasal 16 Ayat (1) huruf (l) , yaitu dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian pada proses pidana, Kepolisian Negara RI berwenang untuk mengambil tindakan lain yang menurut pandangan hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pasal 18 Ayat (1), yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kemudian ayat (2), yaitu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.

- 4) Pasal 19 Ayat (1) adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara RI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian ayat (2), yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara RI mengutamakan tindakan pencegahan.
- d. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), maka dalam membantu menjalankan tugas pokok petugas polisi, diberikan wewenang dan senjata berupa diskresi dalam proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu:
 - 1) Pasal 5 Ayat (1) poin a angka 4, penyidik berwenang melakukan perbuatan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Pasal 7 Ayat (1) huruf j Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mengadakan perbuatan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun “tindakan lain” ini dibatasi dengan:⁶⁴

- 1) Tidak bersebrangan dengan aturan hukum;
- 2) Harmonis dengan kewajiban hukum yang mewajibkan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Perbuatan tersebut harus patut dan logis serta termasuk dalam wewenang di lingkungan jabatannya;
- 4) Berdasarkan pertimbangan yang patut berdasarkan kondisi memaksa;
- 5) Menghormati dan menghargai hak asasi manusia.

Contoh diskresi kepolisian yang dapat kita lihat sehari-hari adalah di jalan. Contohnya, ketika ada seorang ayah sedang mengantar anaknya yang masih kecil dengan seragam Taman Kanak-Kanak menggunakan sepeda motor di pagi hari. Sang ayah memakai helm sedangkan anaknya tidak memakai helm. Melihat hal tersebut, polisi lalu lintas yang sedang berjaga seharusnya melakukan tilang kepada mereka, tetapi polisi tersebut justru membiarkan ayah dan anak tersebut lewat begitu saja.

Contoh kedua adalah ketika berada di persimpangan jalan dengan lampu lalu lintas, biasanya ada pos polisi di sekitarnya. Dari sekian pengguna jalan yang ada, terkadang ada saja pengendara motor tidak memakai helm dengan

⁶⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana” (1981), Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a sub 4 dan Pasal 7 ayat (1) sub j.

memanfaatkan keramaian lalu lintas di jalan. Melihat hal tersebut, polisi terkadang membiarkan dan tidak melakukan tilang kepada mereka.

Kedua contoh sebelumnya merupakan contoh penerapan diskresi yang dilakukan polisi lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari pilihan tindakan yang dilakukan dengan tidak memberikan tilang pada pengguna jalan. Perbuatan polisi pada contoh pertama lebih memberikan kesempatan kepada orang tua tersebut untuk dapat mengantarkan anaknya dengan selamat meskipun anaknya tidak memakai helm dengan pertimbangan bahwa penumpang tersebut masihlah anak-anak yang akan mengikuti perkataan orang tuanya untuk tetap berpegangan tangan saat di atas motor. Sedangkan pada contoh kedua, perbuatan polisi tersebut lebih didasari ke pertimbangan terjadinya kemacetan lalu lintas jika ia memberi tilang, maka tidak ada petugas polisi yang akan menjaga kondisi jalan di persimpangan.

Sebaliknya, polisi tersebut merasa jika anggota polisi memberikan tilang, maka pada contoh pertama akan membuat kemacetan di jalan akibat fokus anggota polisi tersebut yang beralih ke proses tilang, sehingga kondisi jalanan yang ramai akan menjadi kacau, sebagaimana terjadi pada hampir sebagian besar jalan di pusat kota. Selain itu, perasaan manusiawi dari seorang polisi sebagai manusia biasa juga mendorong dirinya untuk tidak melakukan tilang melihat seorang ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Sedangkan pada contoh kedua, jika anggota polisi tersebut melakukan tilang, maka akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas demi menilang satu pengendara, sedangkan jalan akan macet akibat ratusan pengendara lain.

Namun yang menjadi catatan adalah meskipun perbuatan polisi pada contoh sebelumnya memiliki niat yang baik, namun perbuatan tersebut tetap tidak sesuai peraturan dan tidak bisa senantiasa diterapkan, maka harus dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Proses mengambil suatu tindakan tersebut yang disebut diskresi oleh kepolisian.

Dalam upaya menanggulangi geng motor, secara preventif pihak polisi melakukan razia motor-motor yang tidak memiliki surat-surat dan tas-tas sekolah yang dicurigai membawa senjata tajam ke seluruh sekolah, dengan dibantu para guru dan kepala sekolah.

Tembak mati atau tembak melumpuhkan, merupakan stimulus jitu untuk memberikan efek jera pada mereka. Namun, aksi polisi mengarah kepenembakan itu belum bisa terlaksana. Geng motor yang diproses di pengadilan tak akan memberikan efek jera. Ketika pelaku divonis bebas, rekan-rekannya menyambut dan mengelu-elukan. Jika anggota geng motor ditangkap dan diadili maka anggota itu menjadi pahlawan.⁶⁵

3. Sisi Positif dan Negatif Diskresi

Perbuatan diskresi merupakan suatu hal yang dapat dilakukan, tetapi tidak dapat dilakukan secara serta merta. Maka dari itu, implementasi perbuatan diskresi memiliki

⁶⁵Syaeful Aziz, "Kenakalan Remaja Geng Motor," 2015, <https://blog.uad.ac.id/syaeful1300001097/2015/01/13/makalah-kenakalan-remaja-geng-motor/>, Diakses pada 24 Juni 2020.

peluang yang besar untuk diperdebatkan. Di samping itu, diskresi juga memiliki sisi positif dan negatif. Hal positif diskresi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:⁶⁶

- a. Dari sisi organisasi kepolisian, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan. Artinya, polisi baru akan menggunakan diskresi apabila hal itu diperlukan atau seperlunya saja. Dengan demikian, harus dicegah jangan sampai diskresi diobral hingga melanggar hak-hak warga. Misalnya, penangkapan tersangka yang memang tidak memerlukan penembakan dan juga dengan pemborgolan tersangka, hal itu dilakukan jika memang dipandang perlu agar tidak melarikan diri.
- b. Menurut William Ker Muir, penentuan pilihan dalam menggunakan diskresi merupakan suatu cara pembangunan moral polisi. Pengalaman petugas patroli dalam pembuatan keputusan dengan berbagai variasi dan lingkungan serta pihak-pihak yang terlibat bisa meningkatkan

⁶⁶Sutadi, hlm. 146.

cakrawala intelektualitas si Petugas serta menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan, bukannya dengan kesewenang-wenangan dan semangat berlebihan.

- c. Diskresi adalah salah satu alat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Banyak kasus yang menunjukkan polisi menolak melakukan penahanan seorang tersangka dan tidak melakukan penyidikan dalam kasus kekerasan karena korban telah memaafkan pelaku.

Sedangkan sisi negatif dari diskresi adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Diskresi mendorong terjadinya *low visibility decision* oleh petugas. Istilah tersebut memiliki dua makna, yakni:
 - 1) Eksistensi dan keleluasaan diskresi polisi belum secara luas dihargai atau dimengerti oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan keduanya jarang dimengerti oleh masyarakat, boleh administrator polisi atau otoritas berwenang.
 - 2) Penerapan diskresi oleh petugas tidak biasa atau tidak pernah diawasi oleh masyarakat, otoritas wewenang, administrator polisi atau penyelia. Petugas patroli dan reserse bekerja

⁶⁷Sutadi, hlm. 53.

sendiri atau dengan rekan kerja yang setia dan terpercaya. Penggunaan diskresi oleh petugas tidak bisa dikaji, khususnya jika penahanan tidak dilakukan atau tidak ada laporan resmi oleh petugas (situasi di mana hubungan polisi-masyarakat paling sering terjadi).

- b. Keputusan diskresi oleh petugas cenderung bersifat rahasia dan tidak diatur. Pelaksanaan penggunaan diskresi juga sering membingungkan warga, karena tidak adanya kepastian hukum.
- c. Perlakuan petugas terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran secara berbeda-beda, mendorong munculnya kecemasan dari masyarakat yang menilai polisi telah bertindak secara diskriminatif dan inkonsisten, seras tidak adil.
- d. Hambatan selanjutnya dalam melaksanakan diskresi adalah bagaimana menghasilkan keputusan diskresi yang baik.
- e. Kurangnya akuntabilitas pada petugas polisi dalam melakukan diskresi. Petugas bisa saja berasumsi bahwa mereka memiliki diskresi yang tak terbatas. Bagi para Penyelia dan Administrator Polisi, hal ini dianggap mengkhawatirkan karena diskresi menjadikan mereka tidak bisa memprediksi atau mengatur perilaku petugas lapangan saat tidak ada pengawasan langsung.
- f. Diskresi yang berlebihan dapat menjadi salah satu sumber korupsi yang potensial.

4. Penyimpangan Diskresi

Penerapan diskresi yang salah bukan hanya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, melainkan juga sangat membahayakan organisasi kepolisian. Bentuk-bentuk penyimpangan atau pengembangan diskresi sangat beragam, namun dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁸

- a. *Mal-Function*, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Unsur kesengajaan, menyalahgunakan wewenang dengan dalih suatu kebijaksanaan merupakan ciri dari penyimpangan diskresi yang diterapkan. Contoh dari tindakan tersebut adalah:
 - 1) Seorang pengemudi yang parkir di tempat terlarang tidak ditindak oleh petugas polisi lalu lintas dengan dalih diberikan suatu kebijaksanaan, tetapi sebagai imbalannya petugas tersebut minta uang;
 - 2) Seorang pelaku tindak pidana yang seharusnya ditahan, ternyata tidak ditahan dengan alasan diperlukan suatu kebijaksanaan berhubung keadaan keluarganya yang sangat memerlukannya. Ternyata tersangka tersebut adalah salah seorang anggota keluarga dari istri penyidik yang harus melakukan penahanan itu.

⁶⁸Sutadi, hlm. 111.

b. *Mis-Function*, yaitu salah dalam penerapan diskresi. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan pada penerap diskresi itu sendiri meliputi ketidaktahuan akan adanya suatu ketentuan atau peraturan hukum, kurang keterampilan, kurang pengalaman tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melakukan kesalahan itu, apalagi kehendak untuk menyalahgunakan wewenang. Contoh dari tindakan tersebut adalah :⁶⁹

- 1) Seorang petugas lalu lintas mengalihkan arus lalu lintas ke suatu jalan larangan dan malahan justru menjadikan kemacetan lebih parah;
- 2) Seorang reserse menangani kasus perdata secara pidana, karena keterbatasannya dalam bidang pengetahuan hukum sehingga tidak bisa membedakan antara keduanya;
- 3) Seorang anggota Shabara menggunakan popor senjata panjang untuk melerai perkelahian antara dua orang remaja, tanpa menyadari bahwa tindakan itu berakibat fatal bagi korbannya.

c. *Non-Function*, yaitu tidak bertindak pada waktu melihat suatu peristiwa yang sebenarnya memerlukan tindakan polisi. Adapun contoh dari tindakan tersebut adalah:

- 1) Seorang anggota Polri yang melihat kecelakaan lalu lintas mengambil keputusan untuk membiarkan saja, tanpa mengambil tindakan

⁶⁹Sutadi, hlm 34.

apapun. Bahkan anggota tersebut berusaha untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu.

2) Seorang anggota Polri yang sedang mengadakan patroli melihat dua orang remaja bertengkar memutuskan untuk membiarkan saja kejadian itu. Ternyata kejadian itu terus berkembang menjadi perkelahian massal antara murid-murid sekolah menengah dari mana kedua remaja tersebut berasal.

3) Seorang petugas lalu lintas membiarkan saja penumpang sebuah bis kota yang bergelantungan, padahal bis kota tersebut melewati persis di depannya.

d. Menurut Reksodiputro, penyimpangan diskresi berbentuk aktif dan pasif. Pasif berarti tindakan yang seharusnya dilakukan polisi tetapi tidak dilakukan, hal ini dikarenakan adanya kolusi dan pemberian uang atau materi pada polisi dalam bentuk penyuapan. Aktif berarti ada tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, tetapi polisi melakukan tindakan itu untuk mendapatkan sesuatu sebagai bentuk pemerasan.

5. Pembatasan Diskresi

Mengingat kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian sangat luas, maka diperlukan batasan-batasan yang diperlukan guna menghindari terjadinya tindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat

kepolisian untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi dari aparat kepolisian berdasarkan peluang diskresi yang bersifat subjektif, maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:⁷⁰

- a. Asas keperluan (*notwending, noodzakulijk*), bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan;
- b. Asas masalah sebagai patokan (*sachlic, zakelijk*). Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil harus dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani;
- c. Asas tujuan sebagai ukuran (*zwekmatig*), bahwa keputusan tentang tindakan yang diambil adalah hal yang paling tepat dalam menghilangkan segala bentuk gangguan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar;
- d. Asas keseimbangan, yaitu prinsip di mana pengambilan suatu keputusan atau kebijakan harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan terhadap objek diskresi.

Menurut Muchsan, pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 hal, yaitu:⁷¹

- a. Apabila terjadi kekosongan hukum
- b. Adanya kebebasan interpretasi
- c. Adanya delegasi perundang-undangan

⁷⁰Sutadi, hlm. 53.

⁷¹Sutadi, hlm. 31.

d. Demi pemenuhan kepentingan umum

6. Pertimbangan dan Pertanggungjawaban Diskresi

Dalam melakukan diskresi diperlukan banyak pertimbangan yang kadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pertanggungjawaban juga harus siap dilakukan oleh pelaku diskresi, termasuk aparat kepolisian.

Langkah keputusan diskresi yang dilakukan oleh polisi menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan, seperti:⁷²

- a. Adanya hukum lokal yang berlaku di setiap daerah, di mana nilai kearifan lokal daerah berbeda satu sama lain. Penggunaan hukum adat yang bersifat lokal akan lebih efektif dibandingkan dengan hukum positif;
- b. Hukum lokal akan lebih mudah diterima dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat, termasuk pelaku, korban dan masyarakat;
- c. Diskresi yang merupakan suatu kebijaksanaan tersebut memiliki lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatannya;;
- d. Diajukan atas kemauan mereka sendiri;
- e. Selaras dengan prinsip kepentingan umum.

⁷²M. Faal, hlm. 60.

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnick, bahwa tindakan yang diambil polisi didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:⁷³

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan;
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari kepolisian akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku, sehingga menimbulkan rasa tidak suka di kalangan warga Negara biasa yang patuh pada hukum.

Tanggung jawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi apabila diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Artinya, jika diskresi itu dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*), tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh UU, merugikan orang lain atau pihak-pihak, tidak sesuai dengan kebijakan, bersifat kriminal, diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.

Jika kita berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka diskresi akan terkait dengan permasalahan subyek yang memiliki kewenangan membuat diskresi, maka subyek yang berwenang untuk membuat suatu diskresi adalah

⁷³Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, ed. Frans J.Rengka Karolus Medan (Buku Kompas, 2003), hlm. 173.

administratif Negara dalam pengertian sempit, yaitu eksekutif.⁷⁴

Terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan diskresi, pertanggungjawabannya dapat dilihat dari beberapa segi:⁷⁵

- a. Hukum Administrasi
- b. Hukum Pidana
- c. Hukum Perdata
- d. Moral dan Etika

Tindakan hukum administratif dapat terjadi jika kesalahan menggunakan diskresi itu berakhir pada gugatan praperadilan yang kemudian dimenangkan pemohon. Selanjutnya, pemohon mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas tindakan keputusan polisi yang mewakili institusi tersebut. Kompensasi ganti rugi dibayarkan oleh institusi kepolisian, jika polisi yang melanggar itu bertindak atas nama institusi. Adapun tindakan atau sanksi hukum pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar diskresi dan perkaranya diadili oleh pengadilan.

Sedangkan dari segi hukum perdata, inisiatif penuntutan ganti rugi oleh korban dan pengadilan yang memutuskan dan tanggungjawab dipikul sendiri oleh anggota polisi yang bersangkutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

⁷⁴Febriyan, hlm. 46"

⁷⁵Rahardjo, hlm. 64.

Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dinyatakan mengganti kerugian tersebut.

Sementara itu, pada Pasal 1366 KUHPerdara disebutkan:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Sedangkan dari segi moral atau etika kepolisian, sanksi dalam juga diberikan kepada oknum yang keliru atau menyalahgunakan diskresi. Meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut, penerapan diskresi tersebut di lapangan karena situasi dan kondisi sangat mempengaruhi penerapan diskresi. Jenis sanksi yang akan didapatkan mulai dari sanksi moral, misalnya dicemooh masyarakat hingga sanksi pidana jika terbukti oknum kepolisian tersebut menyalahgunakan diskresi untuk kepentingan kejahatan.

Diskresi dalam satu sisi jika digunakan murni demi penegakan hukum dan dasar dilakukannya tindakan-tindakan yang bersumber dari hati nurani seorang personel kepolisian, moral serta dibarengi dengan asas kewajiban dan asas keseimbangan maka efek yang ditimbulkannya pun akan baik dalam masyarakat. Namun disatu sisi, ada risiko dalam penggunaan diskresi yang berujung pada tindakan-tindakan sewenang-wenang personal kepolisian.

Tindakan sewenang-wenang ini bisa berbentuk diskriminasi ataupun munculnya motif ekonomi dalam

implementasi diskresi tersebut. Mengingat risiko yang begitu luas akan penggunaan diskresi tersebut, maka pengawasan serta kontrol begitu sangat diperlukan. Kontrol tersebut karena sifat diskresi yang bersumber dari pertimbangan moral personel kepolisian, maka bentuknya haruslah berawal dari kontrol diri sendiri. Selain itu, kontrol dari rekan dalam satu unit maupun pimpinan tidak kalah penting dalam hal ini.

Dalam implementasinya, bentuk kontrol dari kepala satuan atau dari unit yang memang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan ini bisa saja berbentuk tindakan tegas bagi kepolisian yang melakukan penyimpangan-penyimpangan diskresi. Sehingga bentuk pertanggungjawaban bagi seorang personel kepolisian atas penyimpangan yang ia lakukan sangat perlu diperhatikan.

Dalam menentukan pilihan di lapangan terhadap konsep diskresi yang menjadi pertimbangan dasar adalah pertimbangan moral personel kepolisian tersebut. Bahkan, sebenarnya dalam setiap tugas kepolisian mengandung nilai kemanusiaan yang tinggi di mana nilai kemanusiaan merupakan nilai dasar moral. Oleh karena itu, moral merupakan sarana utama dalam mengendalikan personel kepolisian.

Moral merupakan landasan kepribadian bagi seluruh personel kepolisian atau dapat disebut sebagai pemegang profesi kepolisian dan moral tersebut dilandaskan untuk menjadi etika profesi kepolisian. Selanjutnya, ketika aparat kepolisian diduga melakukan penyimpangan dalam

penerapan diskresi, maka oknum tersebut dapat disidang melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian.

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian adalah ketika keliru dalam melakukan diskresi adalah memperoleh sanksi sesuai aturan kode etik dalam penerapan diskresi kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Komisi Kode Etik secara eksplisit menggambarkan bahwa Komisi Kode Etik harus ada pada tiap tingkatan baik itu di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Wilayah (Polwil/Poltabes/Polrestabes), dan Kepolisian Resort (Polres/Polresta/Polrestro). Pengaturan tentang adanya Komisi Kode Etik dalam tiap tingkatan Kepolisian menggambarkan bahwa pada tiap tingkatan harus siap sedia dalam menangani suatu penyimpangan kode etik dari seorang personel kepolisian.

Pada tiap kewilayahan Kepolisian mulai dari tingkat Polda, Polwil/Poltabes/Polrestabes, dan Polres/Polresta/Polrestro diketuai oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Personel yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan adalah personel tingkat Perwira Menengah (Pamen), sedangkan jika personel yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang adalah tingkat Perwira Pertama (Pama) dan Bintara, maka di tingkat Polwiltabes yang menjadi Ketua Komisi Kode Etik adalah Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Wakapolrestabes).

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dapat mengeluarkan tiga jenis keputusan kepada personel kepolisian, yaitu:

- a. Pemberhentian dengan hormat;
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH);
- c. Permintaan maaf kepada Publik.

Sidang kode etik diadakan oleh Komisi Kode Etik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari bentuk diskresi yang menyimpang. Seperti yang dijelaskan bahwa salah satu motif diskresi yang menyimpang adalah diskresi yang bermotif ekonomi.

Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) dalam struktur Polretabes Makassar hanya bertanggungjawab pada pengawasan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dan penindakan atas pelanggaran disiplin. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di tingkat Polrestabes hanya dapat dipertanggungjawabkan di depan Komisi Kode Etik Kepolisian yang tingkat Polrestabes diketuai oleh Wakapolrestabes kemudian didampingi oleh Kepala Seksi Bagian Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam) sebagai wakil, dan Kepala Unit P3D sebagai sekretaris Komisi Kode Etik.

Menurut Yahya Harahap, praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan, upaya paksa, ataupun tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Hal ini berhubungan dengan penghormatan atas hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa. Jika seorang personel kepolisian menangkap atau menahan seseorang dengan

sewenang-wenang, maka personel tersebut dapat dipraperadilan.

Lain halnya dengan seorang personel yang tidak menahan tersangka karena adanya imbalan uang. Maka personel tersebut harus diperiksa oleh Komite Kode Etik Kepolisian. Pertanggungjawaban seorang personel, baik itu ke praperadilan atau Komisi Kode Etik harus ditetapkan dengan ketat karena praperadilan atau sidang kode etik profesi adalah pembatas dari kewenangan diskresi yang begitu luas.

Selain upaya hukum praperadilan dan sidang komisi kode etik, terdapat instrumen lain yang dapat dijadikan sarana pengendalian terhadap tindakan-tindakan personel kepolisian, yaitu instrumen hukum pidana. Seorang personel kepolisian, yakni IPTU Sardan, SE. menjelaskan bahwa jika seorang personel kepolisian melakukan suatu tindak pidana maka personel kepolisian tersebut harus menjalani proses hukum pidana. Hasil dari proses pidana tersebut dijadikan bukti dalam sidang kode etik kepolisian di mana setiap pelanggaran baik sidang komisi kode etik kepolisian, pelanggaran hukum pidana, atau penyimpangan diskresi, maka pertanggungjawabannya harus bermuara pada satu saluran yang ada, yaitu pertanggungjawaban pidana.⁷⁶

Setiap atasan yang mengetahui adanya penyimpangan prosedur dalam penyidikan dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, usulan ke Polda setempat untuk diadakan mutasi terhadap anggota tersebut ke tempat lain sampai pada usulan

⁷⁶Febriyan, hlm. 83"

pemecatan/pemberhentian, tergantung dari berat ringannya penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Misalnya saja, menurut IPTU Sardan, SE yang menjelaskan bahwa jika seorang personel kepolisian seharusnya tidak memeriksa seorang tersangka karena sakit dan harus beristirahat total, tetapi pemeriksaan tetap dilakukan, maka tidak perlu ada sanksi bagi personel kepolisian yang melakukan tindakan tersebut. Lain halnya jika personel tersebut menerima imbalan materi berupa uang dari pihak tersangka, maka ini termasuk pelanggaran kode etik karena bisa saja mempengaruhi kinerja tugas dari personel kepolisian tersebut. Jika pelanggaran disiplin ini dilakukan oleh personel kepolisian, maka ketegasan pemimpin dalam mendisiplinkan anggotanya harus betul-betul diterapkan.⁷⁷

IPTU Sardan, SE juga mengatakan bahwa penegak hukum yang menembak mati tersangka adalah suatu tindakan menyimpang yang harus ditangani melalui instrumen hukum pidana dan sidang kode etik kepolisian karena tindakan tersebut menyalahi ketentuan dalam prosedur tentang penembakan. Tetapi, kenyataannya kasus tersebut tidak diproses melalui instrumen hukum yang ada. Hal ini menurut IPTU Sardan, SE disebabkan adanya tindakan pasif sesama personel kepolisian untuk tidak memproses pelanggaran terhadap penggunaan diskresi yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam institusi Polrestabes Makassar masih belum transparan dalam

⁷⁷IPTU SERDAN, "Hasil Wawancara" (2015), pada 5 Oktober 2015.

menegakkan aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personel kepolisian dalam menjalankan kewenangan diskresinya.⁷⁸

7. Faktor Yang Mempengaruhi Diskresi Kepolisian di Lapangan

Penting untuk mengetahui bagaimana penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian kepada geng motor dalam rangka pemberantasan aksi kriminal mereka. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi implementasi diskresi oleh kepolisian:

a. Pemahaman Tentang Diskresi

Penegak hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi dalam membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian pribadi. Pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Diskresi kepolisian tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

⁷⁸SERDAN, pada 6 Oktober 2015 .

- 1) Sifat pelanggaran yang terjadi;
- 2) Kepedulian masyarakat;
- 3) Pola pikir dan moral personel kepolisian;
- 4) Reaksi tersangka;

Maksud dari faktor sifat dari pelanggaran yang dilakukan adalah semakin serius perbuatan tersangka maka semakin terbatas pula kebebasan personel kepolisian untuk melakukan diskresi terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh remaja, dibandingkan dengan tindak pidana yang tergolong berat misalnya pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi personel kepolisian dalam melakukan diskresi adalah faktor kepedulian masyarakat. Jika dalam suatu daerah masyarakat sangat terganggu dengan kejahatan-kejahatan di lingkungannya, misalnya prostitusi atau mabuk-mabukan yang meresahkan masyarakat, maka diskresi kepolisian akan menjadi berkurang. Dalam artian bahwa jika masyarakat semakin keras tekanannya terhadap jenis kejahatan tertentu dalam wilayahnya maka diskresi kepolisian akan semakin sempit.

Adapun faktor yang ketiga adalah faktor kerangka fikir personel kepolisian dan reaksi tersangka. Jika personel kepolisian mendapatkan kesulitan dalam menghadapi tersangka, ditambah lagi tersangka tersebut memberikan sikap yang bermusuhan terhadap personel kepolisian, maka personel kepolisian tersebut tidak akan bermurah hati terhadap pelanggarannya. Khusus pada faktor ketiga yaitu

sikap tersangka terhadap petugas ikut mempengaruhi penggunaan diskresi.

b. Peraturan Yang Menjadi Dasar Penerapan Diskresi

Hasil penelitian dalam karya ini menunjukkan bahwa tiap individu kepolisian di Polrestabes Makassar memiliki hak untuk melakukan diskresi yang sama, yang dapat dilakukan dalam mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan, apalagi jika hal tersebut menuntut pengambilan keputusan yang cepat. Tiap diskresi yang dilakukan harus memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat, tanpa harus mengorbankan pihak lain dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana yang ada.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan IPTU Ismail, SH dan IPTU Sabbarang yang berlangsung pada tanggal 20 November 2015 di Polrestabes Makassar, keduanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Tiap individu di Polrestabes Makassar memiliki hak yang sama dalam melakukan diskresi, di mana diskresi tersebut harus memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat, tanpa mengorbankan pihak lain.

Selanjutnya, bahwa diskresi tersebut pada intinya adalah segala tindakan yang dilakukan anggota kepolisian yang terdapat unsur pertentangan dengan hukum yang berlaku, namun bertujuan menjaga kepentingan umum karena memiliki manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Walaupun penerapan diskresi terkadang menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah dan bertentangan dengan aturan, diskresi tidak boleh dilakukan secara serta-merta. Dibutuhkan pertimbangan luar biasa yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sehingga diskresi yang dilakukan tersebut dapat diterima oleh publik.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum diskresi oleh polisi yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Pasal 5, 7, 16, Dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Hukum Tidak Tertulis yang Berlaku Didalam Masyarakat.

Hukum yang tidak tertulis merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia yang sesuai dengan kebudayaan dan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum tidak tertulis adalah sesuatu yang sifatnya konstitusional sebagaimana penjelasan umum UUD 1945, yakni:

Hukum dasar yang tidak tertulis merupakan hukum yang timbul dan telah ada sejak masyarkat itu ada dan terpelihara dengan baik

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum

di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasarkan hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat, dan dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak mempertahankan perlindungan keamanan, dan ketertiban yang ada di dalam masyarakat serta tidak merugikan orang lain.

Penyelesaian perkara dengan mengenyampingkan perkara-perkara ringan dalam prakteknya biasanya dilakukan atau diselesaikan melalui hukum adat atau kebiasaan di masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki hukum positif yang berlaku nasional, namun tidak serta-merta hal tersebut akan diterima masyarakat, justru akan menimbulkan *chaos* jika dipaksakan. Jalur kekeluargaan merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah sekaligus memperbaiki keadaan yang rusak sebelumnya, sama halnya dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan bagi para pihak yang terlibat. Di sinilah peran polisi yang juga wajib mengetahui hukum adat yang berlaku agar penerapan diskresi dapat berjalan lancar.

c. Pendapat Para Ahli Hukum yang Sesuai Dengan Yurisprudensi

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penyidik sebagai aparat kepolisian mengambil pendapat para ahli atau pakar hukum sebagai landasan mengambil tindakan, utamanya dalam hal melakukan diskresi. Utamanya dalam melakukan kebijaksanaan tersebut agar dapat relevan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan segala tindakan yang

diambil oleh aparat kepolisian akan dipertanggungjawabkan pada proses selanjutnya.

8. Penerapan Diskresi Pada Aksi Kriminal Geng Motor

Penerapan diskresi merupakan proses pengambilan keputusan oleh polisi yang seharusnya dibuat secara tepat dan arif. Pengambilan keputusan secara tepat biasanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, sedangkan pengambilan keputusan secara arif didasarkan atas pertimbangan moral pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan yang hampir tidak bisa dikontrol karena seringkali melibatkan pertimbangan moral.

Pemberian wewenang diskresi biasanya seperti melakukan filter perkara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau aspek sosiologis masyarakat. Terminologi diskresi di institusi kepolisian dapat berupa sikap memaafkan, memberikan nasihat, penghentian penyidikan dan lainnya.

Beberapa contoh kasus pelanggaran kode etik profesi yang terjadi pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Anggota Yang Melanggar Penerapan Diskresi

Laporan Polisi	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Pasal	Putusan
LP/32/IV/2015/P3D	BRIPTU S terlibat dalam kasus tawuran antar warga dan mahasiswa Palopo dan menyimpan motor orang lain selama 3 (tiga) bulan.	Pasal 3 huruf (g), Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Huruf (r), PP RI No. 2 Tahun 2003.	Melalui sidang disiplin: penundaan pendidikan selama 1 (satu) tahun.

Sumber: Data Polrestabes Makassar, 2015

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seorang anggota kepolisian telah melakukan diskresi dengan lalai, yaitu menyimpan motor orang lain selama 3 (tiga) bulan semenjak peristiwa tawuran antar warga. Penyimpanan tersebut bertujuan untuk mengamankan kendaraan yang merupakan milik warga agar tidak terkena aksi massa. Tetapi, semenjak insiden tawuran tersebut, seyogyanya anggota polisi tersebut memberitahukan warga bahwa motor yang disimpan ada di rumahnya, sehingga warga tidak panik, mengira motornya telah dicuri. Sebaliknya, hal ini akan membuat kecurigaan pada anggota polisi tersebut,

di mana ia akan diduga memiliki niat jahat dengan motor warga tersebut.

Adapun data yang diperoleh berupa kasus pelanggaran disiplin oleh aparat kepolisian di tahun 2014 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Data Pelanggaran Disiplin

Tahun	2014	2015	Persentase (%)
Kasus siap sidang	19	32	41,12
Kasus yang selesai	84	130	58,86
Jumlah Kasus	103	162	100

Sumber: Data Primer diolah dari Polrestabes Makassar

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dilihat jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan sebanyak 50%, sedangkan jumlah kasus 2014 meningkat dari sebanyak 103 kasus menjadi 162 kasus di tahun 2015, sehingga jumlah total kasus pelanggaran disiplin dari tahun 2014 hingga 2015 adalah 265 kasus.

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Fikram yang dilakukan pada 20 November 2015, ia menyatakan bahwa dari 265 kasus tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu kasus yang dapat dilakukan diskresi dan kasus yang tidak dapat dilakukan diskresi. Contoh kasus

yang tidak dapat dilakukan diskresi adalah kasus-kasus berat, seperti kasus perkosaan, pencabulan, dan pembunuhan. Sedangkan kasus yang dapat dilakukan diskresi adalah penipuan, pencurian, dan membawa senjata tajam.

Sedikitnya jumlah kasus yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa penyidik atau penyidik pembantu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Meski demikian, sedikitnya perkara yang belum terselesaikan bukan berarti proses penyidikannya telah berlangsung dengan benar sesuai amanat Undang-Undang, karena masih ditemukan adanya kekerasan dalam penyidikan. Modus yang sering terjadi adalah tersangka dipukuli, dibentak, atau ditodongkan pistol serta diancam akan ditahan jika tidak mengakui perbuatannya. Jika pengakuan sudah didapat, maka kekerasan akan dihentikan dan hak-haknya akan dipenuhi.

Penerapan diskresi sangat bergantung pada masalah yang terjadi di lapangan. Meskipun, diskresi sifatnya subjektif dan situasional, tetapi diskresi tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa pertimbangan yang matang.

Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pada Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada aparat kepolisian untuk mengambil solusi guna menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan yang kadang-kadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum yang kaku atau karena belum ada aturannya sama sekali. Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan suatu pertimbangan kebijaksanaan

dari oknum polisi itu sendiri, karena jika sudah berada di lapangan, maka akan susah jika polisi tersebut meminta pertimbangan kepada atasannya sedangkan situasi di lapangan membutuhkan tindakan segera.

Undang-undang memberikan keselamatan bagi polisi untuk melakukan diskresi, tetapi penyidik di Polrestabes Makassar enggan menggunakannya. Hal tersebut disebabkan diskresi harus dilakukan dengan perhitungan yang matang dan juga terdapat pengawasan yang ketat serta pertanggungjawaban yang harus diberikan nanti. Selain itu, pelaksanaan diskresi tidak boleh melewati batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pelaksanaan diskresi harus sesuai dengan perintah dari pimpinan dan hukum kriminal yang berlaku. Diskresi yang sangat subyektif rawan akan terjadinya diskriminatif. Kehadiran diskresi bertujuan melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sehingga tidak dibenarkan jika pelaksanaannya demi kepentingan pribadi untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, tiap keputusan terhadap diskresi dapat diminta pertanggungjawabannya.

IPTU Fikram, salah seorang anggota Reserse Kriminal Polrestabe Makassar, menyatakan:

Sekalipun tugas reserse bersifat represif, namun sebagai polisi unsur preventif juga selalu melekat pada tugas represif tersebut, sehingga setiap masalah dalam penyidikan juga dilihat dari segi preventif maupun represif. Dalam hal ini, di dalam melihat hukum pidana positif tidak harus begitu

kaku, melainkan terdapat juga berbagai kebijaksanaan, yang dalam terminologi polisi disebutkan sebagai diskresi. Seperti penyampingan perkara, penghentian perkara pidana dalam penyidikan selama dapat dipertanggungjawabkan dari sisi tugas kepolisian dan diskresi adalah salah satu jalan keluarnya.

Diskresi dapat dilakukan kepada geng motor, tetapi hal yang menarik adalah diskresi kepada anggota geng motor yang masih kategori anak. Diskresi dibutuhkan dalam menghadapi aksi kriminal geng motor. Diskresi yang dimaksud adalah mengambil tindakan yang mengedepankan kemanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan tersebut harus tidak bersifat diskriminasi, tidak didasari motif ekonomi, dan mengambil keuntungan pribadi. Berikut adalah hasil penelitian mengenai alasan pentingnya diskresi terhadap anak yang merupakan anggota geng motor.

Salah satu tugas pokok kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berangkat dari hal tersebut kemudian anggota kepolisian diberikan diskresi untuk memaksimalkan kineja di lapangan.

Hal ini dilakukan karena seringkali banyak perbedaan antara teori dan praktek di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, ketika menjaga laju lalu lintas agar tidak macet, seringkali anggota kepolisian tidak mengikuti lampu lalu lintas dan mengarahkan langsung kendaraan motor dengan sistem buka tutup.

Dalam hal menangani aksi kriminal yang dilakukan geng motor, menurut penulis, sebaiknya anggota kepolisian melakukan hal berikut:

- a. Menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara yang persuasif;
- b. Melakukan diversi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Bekerjasama dengan institusi penegak hukum lain dan lembaga bantuan hukum yang terkait dengan anak;

Tindakan diskresi dibutuhkan dalam hal membuat jera para pelaku dan membuat masyarakat merasa aman. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan, berupa:

- a. Melakukan edukasi seperti sosialisasi tentang sanksi hukum terhadap perilaku menyimpang;
- b. Membuat pos jaga di wilayah rentan akan tindak kriminal, khususnya ancaman anggota geng motor;
- c. Melakukan mediasi sebagai upaya untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik;
- d. Upaya menciptakan tokoh masyarakat yang dapat menjadi panutan dan contoh yang baik;
- e. Kepentingan Anak.

Dalam hal anak yang menjadi pelaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kepentingan anak merupakan salah satu asas penting yang harus dipenuhi. Dalam proses penanganan anak melalui diversi, maka anak yang sebagai pelaku wajib melakukan diversi yang dimulai dari kepolisian.

Berdasarkan pengamatan di Polrestabes Makassar, Polsek Rappocini, dan Polsek Biringkanaya, ketika kepolisian melakukan diversi, hal yang seringkali dilakukan anggota kepolisian adalah:

- a. Mengembalikan anak kepada orang tua untuk mendapatkan pembelajaran dan pengasuhan;
- b. Menahan anak sementara di sel Kepolisian Wilayah/Polsek;
- c. Melakukan mediasi antara pihak pelaku dan pihak korban dengan membawa tokoh masyarakat dari tempat tinggal pelaku untuk musyawarah mencari solusi damai;
- d. Anggota kepolisian langsung membawa ke jaksa untuk dilanjutkan mediasi;
- e. Anggota kepolisian membawa anak berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku atau korban ke Kementerian Sosial melalui Lembaga Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar di Jl. Ir. Soetami untuk dibina;
- f. Kadang anggota kepolisian bersama lembaga panti sosial hanya memberikan pembinaan pada

anak sebagai pelaku yang merupakan anggota geng motor walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana berat yang sebenarnya tidak bisa dilakukan diversi. Sehingga kasus anak tersebut tidak diproses secara hukum pidana sebagaimana mestinya.

Hal yang menjadi catatan adalah tindakan yang dilakukan anggota kepolisian bekerjasama lembaga panti sosial yang hanya memberi pembinaan kepada anak berhadapan dengan hukum yang sebagai pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut penulis, hal yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut merupakan suatu tindakan diskresi yang baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Rahman (16 tahun) pada tanggal 2 Desember 2015 di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar. Ia mengatakan bahwa dirinya ditangkap polisi setelah mencuri motor di Jln. Nusantara Makassar.

Usia responden yang masih kategori anak, membuat kepolisian hanya melakukan pembinaan dengan membawanya ke panti sosial untuk dibina. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan responden adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak bisa dilakukan diversi. Jangka

waktu anak di panti sosial ditentukan oleh jaksa dan tergantung masa perubahan pada anak, jika anak dinilai sudah bisa mengontrol dirinya dan mampu kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik, maka ia bisa dikembalikan ke orang tua mereka.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Saleh, ketua bagian Pembinaan Anak di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar. Ia mengatakan bahwa pihak panti sosial dan kepolisian merasa bahwa anak yang melakukan tindak pidana berat, seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, bahkan pembunuhan kadang kala terjadi karena anak tersebut belum mengetahui apa arti dari membunuh. Pada beberapa kasus, anak melakukan tindakan tersebut semata-mata karena tidak disengaja dan dipengaruhi oleh orang lain, anak belum mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan bisa berakibat hukuman pidana.

Penulis setuju dengan diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan lembaga panti sosial tersebut, mengingat kepentingan anak adalah nomor satu. Tapi, hal ini hanya bisa dilakukan pada anak yang bukan *recidive* dan berdasarkan pemeriksaan pelaku dan saksi, semuanya cenderung kepada ketidaksengajaan dan adanya unsur eksploitasi anak.

9. Efektivitas Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian

Pelaksanaan diskresi oleh institusi kepolisian sangat bergantung kepada kualitas individu aparat kepolisian tersebut. Penerapan diskresi diproses penyidikan memiliki

pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis kasus, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan budaya setempat. Selain itu, situasi dan kondisi serta perasaan hati nurani petugas penyidik sebagai individu, seperti penyelesaian perkara pidana pada saat penyidikan yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang hukum adatnya sangat kuat, seperti kasus pencurian, pengoroyokan, dan perzinahan.

Dalam hal ini, polisi hanya mengawasi dan mengoordinasi serta memonitoring untuk menghindari sanksi-sanksi yang mungkin melampaui batasan hak asasi manusia dan kemanusiaan serta hukum.

IPTU Ismail, S.H., Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, yang diwawancara pada tanggal 20 November 2015, menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya, sebagai penyidik, akan melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana yang terjadi di dalam wilayahnya. Namun, untuk proses selanjutnya polisi sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berupa diskresi tersebut.

Upaya diskresi biasanya banyak dilakukan terhadap kasus-kasus kecil atau ringan, kurang efektif, dan dianggap sepele, sehingga terhadap perkara-perkara tersebut. Menurut polisi, cukup dilakukan perbuatan memaafkan, menasehati, dan mendidik mereka. Sedangkan, tindakan yang diambil oleh penyidik harus selaras dengan agama, kesusilaan, hukum dan kesopanan.

Berdasarkan pengamatan di Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa terdapat beberapa perkara pidana yang tidak diproses, walaupun semua perkara itu merupakan tindak pidana, diantaranya:⁷⁹

- a. Petugas kepolisian menemukan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi pihak kepolisian menggunakan cara mediasi atau damai, sehingga perkara tersebut tidak diproses lebih lanjut.
- b. Dalam tindakan pencurian ringan, polisi bisa melepaskan pelakunya apabila pemilik barang yang dicuri ternyata merelakan barang miliknya tersebut.
- c. Penjual yang merek barangnya dipalsukan oleh pedagang asongan walau dianggap pelanggaran, tetapi petugas seringkali tidak menindaknya apabila jumlah yang beredar di masyarakat sedikit dan tidak membahayakan.

Berdasarkan contoh tersebut, meskipun tergolong sebagai tindak pidana, namun diskresi sering dilakukan oleh penyidik dengan mengenyampingkan perkara tersebut, yang disebabkan karena perkara tersebut merupakan tindak pidana ringan, di mana pihak yang dirugikan tidak menuntut. Memilah perkara atau pengenyampingan perkara harus didasari oleh kebutuhan praktek, bukan hanya dari sudut pandang hukum semata, tetapi dari kebutuhan sosial

⁷⁹“Hasil Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Makassar” (2015), pada 15 November 2015.

budaya setempat serta pembinaan dan bimbingan masyarakat juga harus dipenuhi.

Perbuatan diskresi yang dilakukan di Polrestabes Makassar, berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa penyidik secara intens atau sering menangani kasus-kasus pidana dengan mengambil jalan keluar secara kompromi, perdamaian sesuai dengan kebiasaan dan adat setempat. Menurut beberapa aparat kepolisian, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan formil, kasus-kasus tersebut kemudian dipertimbangkan kembali berdasarkan kepentingan masyarakat secara umum, agar lebih efektif jika diselesaikan lewat “tindakan damai” seperti diskresi.

Menurut IPTU Ismail, SH, kasus yang menyangkut jiwa manusia adalah perkara yang sulit untuk diterapkan diskresi. Oleh karena itu, dalam prakteknya, ternyata diskresi diberlakukan tidak hanya kepada perkara yang ringan, tetapi juga terhadap perkara yang tergolong berat pun juga dapat diselesaikan dengan diskresi kepolisian, tentunya dengan syarat telah dipertimbangkan dengan matang bobot masalah dan dampak yang akan ditimbulkan di masyarakat.⁸⁰

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi utamanya pada proses penyidikan di Polrestabes Makassar selalu melalui proses analisis faktor yang ketat dan disesuaikan dengan persepsi polisi yang mengungkapkan kenyataan tentang apa yang mereka ketahui dan bagaimana

⁸⁰IPTU Ismail, “Hasil Wawancara” (2015), pada 16 November 2015.

kewenangan tersebut direalisasikan dalam tugas-tugas aparat kepolisian.

Tindakan diskresi oleh kepolisian terkadang merupakan jalan keluar yang diambil, namun seringkali menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dalam beberapa kasus, diskresi justru merupakan jalan keluar yang cukup membantu pihak kepolisian, sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya pihak kepolisian tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah, melainkan pengambilan diskresi itu memiliki dasar yang membolehkan menurut aturan hukum.

10. Konsekuensi dan Moral dalam Menerapkan Diskresi

Aturan dan pelaksanaan diskresi oleh kepolisian sering mendapatkan perhatian dari masyarakat luas, yang melahirkan pro dan kontra dari segi hak asasi manusia. Setiap orang atau individu memiliki hak yang sama di mata hukum sebagaimana regulasi pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.⁸¹

Akan tetapi, faktanya, terdapat beberapa kasus di mana aparat kepolisian, guna mendapatkan prestasi, maka aparat kepolisian harus melakukan pilihan-pilihan terhadap kejahatan tertentu, terutama yang dikelompokkan ke dalam kategori sangat serius dan mendapat sorotan dari

⁸¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), Pasal 7.

masyarakat untuk diprioritaskan terlebih dahulu, yang ujung-ujungnya dinilai sebagai suatu bentuk diskriminasi.

Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa aparat kepolisian dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan, selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilakukan selama menjaga asas kepentingan umum dan menjamin kepentingan tugas-tugas kepolisian. Faktanya, meskipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut, tiap individu polisi harus bisa untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan perannya. Hal tersebut bertujuan agar aparat kepolisian tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh aparat kepolisian pada saat penyidikan cukup besar.

Terlepas dari batas-batas kasus-kasus ringan yang diatur oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan perkara, polisi juga diberikan kewenangan diskresi dalam menjalankan tugasnya, seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18, sehingga polisi secara nyata memiliki wewenang untuk melakukan diskresi terutama dalam hal penyidikan seperti, menghentikan, mengenyampingkan perkara atau tidak melaksanakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa diskresi yang dilakukan kepolisian memiliki dasar hukum, yang bagi tiap aparat kepolisian wajib memahaminya. Tindakan diskresi tersebut harus dipertimbangkan secara matang dan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan moril.

Keabsahan perbuatan kepolisian harus selalu berdasarkan peraturan yang berlaku. Perbuatan tersebut harus bertujuan melindungi dan menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum, serta tindakan itu untuk melindungi hak-hak warga sipil. Diskresi hadir dalam membantu aparat menyelesaikan masalah di lapangan, namun tetap harus melihat prinsip dasar yang harus dipatuhi, yaitu:⁸²

- a. Asas keperluan, dengan kata lain setiap tindakan yang diperlukan dengan kata lain, tanpa tindakan diskresi tersebut, maka tugas kepolisian tidak akan terlaksana dengan baik;
- b. Asas kelugasan, yaitu diskresi harus dilakukan secara objektif yang tidak disertai dengan kepentingan pribadi atau motif lainnya;
- c. Asas tujuan sebagai ukuran, artinya setiap tindakan diskresi yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur;

⁸²Ralph Juhnke and Julia A Bermann, "Police Discretion: Relations of Experience to Officers' Beliefs and Arrest Decisions," *American Journal of Kriminal Justice* 12, no. 2 (1988): 243-253, <https://doi.org/10.1007/BF02888937>, hlm. 248.

- d. Asas keseimbangan, bermakna bahwa antara tindakan, tujuan dan sasaran diskresi harus seimbang.

11. Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan dalam Pengambilan Diskresi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di Polrestabes Makassar, dapat diambil kesimpulan tentang faktor penyebab kesalahan pengambilan kebijakan diskresi oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah aparat kepolisian yakni:

- a. Kurang Optimalnya Profesionalitas dan Keahlian Polisi.

Polrestabes Makassar masih membutuhkan lagi tambahan personel polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan, karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik. Profesionalitas dan keahlian polisi yang kurang optimal tersebut, membawa akibat dalam pemberian diskresi oleh penyidik yang tidak tepat dan sesuai dengan yang diharapkan, artinya perkara yang seharusnya didiskresikan malah tidak didiskresikan. sedangkan yang tidak didiskresikan justru polisi diberi diskresi, karena persepsi aparat kepolisian yang keliru.

b. Masih Lemahnya Penegakan Hukum

Beberapa aparat kepolisian yang diwawancarai penulis juga mengakui bahwa hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar khususnya, sangat lemah dan mudah diterobos. Salah satunya adalah hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Hal seperti ini menempatkan aparat kepolisian pada posisi yang serba salah, karena perasaan kekeluargaan tadi menjadikan diskresi seperti penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban karena tuntutan, bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar lebih efektif dan efisien.

c. Oknum Aparat

Oknum Aparat dapat menentukan baik buruknya kualitas diskresi. Adanya penyidik yang mudah disuap, diperdaya maupun diajak kerjasama, dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan aparat kepolisian, menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum, akan tetapi lebih berorientasi pada tuntutan pribadi penyidik itu sendiri untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Diskresi.

Menurut beberapa aparat kepolisian, ketika panggilan data atas suatu kasus atau perkara di lapangan, seringkali ditemukan rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap kerja-kerja kepolisian, yang menjadikan kerja kepolisian sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran

dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh aparat kepolisian. Apabila informasi yang dimiliki aparat kepolisian sedikit, maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga malah memakan waktu lama. Selain hal itu, setiap tindakan aparat kepolisian berupa diskresi, sering dipahami oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang buruk. Masyarakat menganggap bahwa diskresi kepolisian sebagai suatu tindakan penyimpangan hukum yang salah.

D. Faktor dan Upaya Pemberantasan Kriminalitas Geng Motor

1. Faktor Penyebab Aksi Kriminal Anggota Geng Motor

Setiap tindak kriminal yang terjadi memiliki motif atau alasan dari pelakunya, termasuk kriminalitas yang dilakukan anggota geng motor. Sebagai upaya dalam mencari jawaban tersebut, maka penulis melakukan pendekatan secara normatif-empiris untuk mendapatkan data yang berharga.

Berbicara tentang alasan penyebab terjadinya aksi kriminal yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar, penulis mengambil data dari Kota Makassar sebagai profil wilayah tempat pengambilan sampel. Kota Makassar adalah kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan luas 175,79 km² dan penduduk sebanyak 1.112.688 jiwa. Kondisi tersebut telah memenuhi kriteria kota metropolitan.

Pengamatan yang dilakukan di kantor Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada Unit Reskrim melalui wawancara dengan bapak IPTU Fikram dan

IPTU Sabbarang, didapatkan bahwa dari sekian kasus kriminal, yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor dan pencurian biasa. Rekor tindak kejahatan tersebut paling banyak dilakukan oleh anak yang sebagian besar dari mereka diduga anggota geng motor.⁸³

Istilah geng motor belum ada dalam literatur hukum di Indonesia. Istilah geng motor berawal dari bahasa “Media Massa” yang menggambarkan kumpulan anak di bawah umur, di mana mereka masih duduk di bangku sekolah kemudian secara bersama-sama dan sadar melakukan aksi kriminal. Oleh karena itu, ketika penulis mencoba mencari kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota geng motor, penulis mendapatkan kesulitan dalam hal menginventarisasi data kriminal yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 pelaku anak di LAPAS Kelas 1A Makassar, yaitu Andi Cakra (17 tahun, warga Kec. Tallo) dan Indra Anugerah (17 tahun, warga Kec. Manggala), mereka melakukan tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor dengan mengacungkan senjata tajam. Alasan mereka melakukan aksi kriminal tersebut adalah ingin menambah uang saku dari penjualan sepeda motor hasil pencurian dan stres karena tidak dibelikan motor oleh orang tuanya.

Hasil observasi yang dilakukan di lapangan terhadap penghuni LAPAS Kelas 1A Makassar yang berjumlah 7 (tujuh) orang, khususnya yang berkaitan dengan kasus aksi kriminal anggota geng motor di Kota Makassar, yang mana seluruhnya juga berperan sebagai pelaku, didapatkan

beberapa kategori identitas pelaku, yang semuanya dapat dibagi berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, dan pendidikan.

a. Usia

Dari 7 (tujuh) orang tersebut, didapatkan usianya mulai dari 16 tahun sampai 17 tahun. Kategori usia yang melakukan aksi kriminal adalah usia 17 tahun sebanyak 5 orang dan usia 16 tahun sebanyak 2 orang.

b. Jenis Kelamin

Dari 7 (tujuh) orang tersebut, keseluruhan berjenis kelamin laki-laki.

c. Pendidikan

Untuk kategori tingkat pendidikan, sangatlah bervariasi. Sebagian besar dari pelaku masih duduk di bangku SMP dan sisanya SMU dan SMK. Lebih lengkapnya disajikan sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Pendidikan Responden

Pendidikan Responden	Jumlah	Presentase (%)
SMP	5	71,4
SMU	1	14,3
SMK	1	14,3
Jumlah	7	100

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para pelaku aksi kriminal geng motor paling banyak SMP, yaitu sebanyak 5 orang (71,4%), selanjutnya tamat SMU sebanyak 1 orang (14,3%), dan SMK yaitu sebanyak 1 orang (14,3%).

Alasan yang menyebabkan anggota geng motor tersebut melakukan aksi kriminal di Kota Makassar, ketujuh orang tersebut telah memberikan jawaban yang bervariasi. Jawaban atas pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Faktor Penyebab Aksi Kriminal Geng Motor

Faktor Penyebab	Jumlah	Persentase (%)
Tekanan Ekonomi	2	28,55
Sudah Menjadi Kebiasaan	1	14,3
Lingkungan Pergaulan	1	14,3
Mendapatkan Pengakuan Sebagai Geng Motor	2	28,55
Tidak Adanya Fasilitas Untuk Berekspresi	1	14,3
Jumlah	7	100

Sumber: Data Primer diolah dari Kuesioner, 2015

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab aksi kriminal oleh para pelaku yang juga merupakan anggota geng motor adalah tekanan ekonomi (28,55%), kemudian mendapatkan pengakuan

sebagai geng motor (28,55%), lalu sudah menjadi kebiasaan, lingkungan pergaulan, dan tidak adanya fasilitas untuk berekspresi masing-masing sebesar 14,3%.

Bukti-bukti di atas, membawa kita pada kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya aksi kriminal oleh anggota geng motor, yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Sudah menjadi kebiasaan
- c. Lingkungan pergaulan
- d. Mendapatkan pengakuan sebagai geng motor
- e. Tidak adanya fasilitas untuk menyalurkan hobi balapan yang resmi di Kota Makassar
- f. Minimnya tingkat pendidikan
- g. Media massa

Selanjutnya, tiap-tiap faktor penyebab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tekanan Ekonomi

Faktor pertama adalah faktor tekanan ekonomi. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Andi Chakra dan Indra Anugerah, yang merupakan pelaku kriminal dan anggota geng motor, ketika diwawancara pada 20 November 2015 di LAPAS Klas 1A Makassar. Keduanya menyatakan bahwa anggota geng motor berasal dari berbagai macam kalangan, mulai dari kelas atas, menengah, dan bawah secara ekonomi. Namun sebagian besar anggota geng motor merupakan orang tidak mampu secara ekonomi.

Anggota geng motor bertemu dan menjalin komunikasi serta menghabiskan waktu bersama teman-teman. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, seperti merasa lapar dan butuh uang untuk bersenang-senang, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan penjarahan dan pencurian. Hal ini mereka lakukan dengan dalih bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka karena orang tua mereka juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anggota geng motor sangat mengandalkan jumlah mereka ketika melakukan aksi kriminal, sehingga mereka sangat percaya diri dalam bahkan ketika mereka menghadapi aparat kepolisian.

Salah satu contohnya adalah Indra Anugerah (17 tahun), yang melakukan aksi kriminal pencurian kendaraan bermotor. Alasan Indra Anugerah melakukan pencurian kendaraan bermotor bermula pada saat orangtuanya tidak bisa membelikan sepeda motor untuk ia pakai sehari-hari. Orang tua Indra beralasan bahwa mereka tidak memiliki uang dan merasa takut jika anaknya dibeli motor, maka Indra akan bergabung dengan geng motor mengingat lingkungan sekitar tempat tinggal Indra rawan geng motor.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan tekanan ekonomi dan kekhawatiran orang tua jika anaknya memiliki motor, maka anaknya akan bergabung dengan geng motor, yang pada akhirnya memengaruhi sikap anak.

Faktor kemiskinan menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kesulitan ekonomi ini selanjutnya akan

memicu timbulnya ketegangan dalam kehidupan keluarga. Apabila rendahnya ekonomi keluarga berlanjut tanpa ada perbaikan dan ketika ada keinginan anak yang tidak bisa terpenuhi kemudian anak tersebut memaksa, maka anak bisa mengalami stres, kemudian terkadang mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan aksi kriminal pencurian dan sebagainya. Ini merupakan contoh buruk yang bisa terjadi pada setiap keluarga.

Kemudian, berdasarkan hasil kuisioner mengenai tingkat pendapatan orang tua, dari 7 (tujuh) pelaku aksi kriminal tersebut, diperoleh data bahwa semua orang tua pelaku memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000,-. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penghasilan orang tua pelaku sangat rendah sehingga faktor ekonomi (ekonomi lemah) adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya aksi kriminal oleh anak yang juga anggota geng motor.

b. Faktor Sudah Menjadi Kebiasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan memiliki definisi, yaitu sesuatu yang telah biasa dilakukan.⁸⁴ Sedangkan dalam bahasa Inggris kebiasaan disebut dengan *habit*.⁸⁵

Ketika melakukan pengamatan dan wawancara, khususnya dengan Andi Cakra (17 tahun) di LAPAS Kelas 1A

⁸⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketii (Jakarta: Balai Pustaka temen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 155.

⁸⁵Edwin MBA, *Kamus Pelajar* (Jakarta: Tamer Press, 2013), hlm. 65.

Makassar, didapati bahwa ia melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara menodong atau mengacungkan senjata tajam kepada korbannya, kemudian mengancam korban agar memberikan sepeda motornya. Sebelumnya, Andi Cakra juga mengatakan bahwa ia merupakan anggota geng motor dan sudah biasa melakukan pencurian kendaraan bermotor. Aksi kriminal tersebut ia lakukan dengan sadar dan tahu akan akibat hukum yang akan ia terima.⁸⁶

Suatu hal yang langka ditemukan di lapangan ketika Andi Cakra mengatakan bahwa ia sedang menjalani 2 kasus kriminal, yaitu pencurian kendaraan bermotor dan penikaman. Penikaman tersebut merupakan kasus yang berbeda dengan kasus pencurian kendaraan yang ia jalani di LAPAS Kelas 1A Makassar. Saat itu, pelaku mengaku melakukan penikaman ketika akan mencuri kendaraan bermotor, namun korban melakukan perlawanan dan hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar yang seketika mengetahui bahwa sedang terjadi pencurian kendaraan bermotor.

Pelaku, yaitu Andi Cakra, kemudian menusuk korban dengan sebuah badik, lalu membawa lari motor korban. Pelaku mengaku melakukan penusukan tersebut karena korban tidak mau menyerahkan motornya dan alasan lainnya adalah ia menganggap daripada diri saya yang dibunuh oleh massa, lebih baik saya membunuh korban agar saya selamat dan mendapatkan motornya. Pelaku mengaku

⁸⁶Andi Cakra, "Hasil Wawancara" (2015), pada 15 November 2015.

tidak menyesal dan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa cara berpikir pelaku yang melakukan tindakan kriminal merupakan suatu kebiasaan yang wajar terjadi bagi si pelaku dan pelaku merasa tidak menyesal atas perbuatannya memengaruhi seseorang untuk cenderung melakukan aksi kriminal. Sehingga, ketika hal tersebut terus berlanjut, maka akan menjadi kebiasaan pelaku.

c. Lingkungan Pergaulan

Faktor kondisi sekitar atau lingkungan juga berkontribusi aktif dalam melahirkan pelaku kriminal geng motor. Lingkungan yang kumuh dan sempit semakin membuat daerah tersebut menjadi rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan kriminal, seperti tindakan-tindakan amoral, pencurian, perusakan, hingga pembunuhan.

Perkembangan teknologi yang disertai dengan hadirnya gawai dan media lain seperti televisi, buku, serta film dengan berbagai macam iklan untuk menarik perhatian kalangan muda dan remaja sebagai promosinya, juga turut dalam meningkatkan intensitas kejahatan kekerasan anggota geng motor di kota Makassar.

d. Mendapatkan Pengakuan Sebagai Geng Motor

Sebanyak 2 dari 7 pelaku yang menjadi objek wawancara ketika di lapangan, mengakui bahwa alasan mereka melakukan aksi kriminal adalah mendapatkan pengakuan sebagai geng motor. Arti dari mendapatkan pengakuan sebagai geng motor di sini adalah mereka

melakukan aksi kriminal untuk dapat dikatakan hebat, sehingga mendapat pengakuan sebagai anggota geng motor yang sesungguhnya dari anggota yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Cakra (17 tahun) dan Indra Anugerah (17 tahun), mereka mengaku bahwa dalam geng motor terdapat sistem dan prosedur yang harus diikuti oleh setiap anggota.

Menurut Andi Cakra (17 Tahun), sistem yang dimaksud di sini, yaitu di kota Makassar terdapat beberapa geng motor yang berbeda. Kemudian, setiap geng motor memiliki daerah kekuasaan masing-masing, di mana pada setiap daerah kecamatan terdapat pemimpin atau komandan. Pemimpin di wilayah kecamatan juga mengikuti apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh pemimpin utamanya. Hal tersebut termasuk sistem kaderisasi anggota baru, struktur pembagian tugas geng motor, dan pelaksanaan aksi kriminal.

Pada sistem kaderisasi ini, semua anggota geng motor diwajibkan untuk melakukan aksi kriminal dan berhasil lolos dari aparat kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk bisa dikatakan sah dan mendapatkan pengakuan sebagai anggota geng motor. Setelah itu, anggota geng motor tersebut bisa dengan bebas bergabung dan mengikuti semua aktivitas pada geng motor. Selain mendapatkan pengakuan, anggota geng motor yang melakukan aksi kriminal juga bertujuan mendapatkan pujian dari anggota lain, sehingga mereka merasa bangga atas tindak kriminal yang dilakukannya.

Menurut penulis, secara umum geng motor dan klub motor sama dalam hal memiliki sistem dan struktur organisasi. Perbedaan utama antara geng motor dan klub motor adalah perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan aksi kriminal lainnya yang dilakukan oleh geng motor. Sistem dan struktur organisasi seperti adanya pemimpin dan anggota di bawahnya serta kaderisasi membuat geng motor sulit untuk diberantas. Ketika pemimpin geng motor ditangkap, maka anggota di bawahnya akan segera menggantikan pemimpin tersebut guna tetap menjalankan aktifitas geng motor tersebut.

Menurut penulis, mendapatkan pengakuan sebagai geng motor ini merupakan salah satu perbedaan antara geng motor di Kota Makassar dengan kota lainnya, yaitu :

- 1) Untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari anggota geng motor lainnya;
- 2) Anggota geng motor merasa bangga atas tindak kriminal yang dilakukannya;
- 3) Semakin masyarakat semakin takut pada geng motor, maka ia akan merasa bangga dan hebat;
- 4) Anggota geng motor merasa hebat dan bangga ketika berhasil melakukan aksi kriminal dan berhasil lolos dari aparat penegak hukum.

e. Tidak Ada Fasilitas Untuk Berekspresi

Klub motor identik dengan kegiatan konvoi dan balapan. Berbeda dengan klub motor yang terdaftar resmi, geng motor hanya kumpulan pengendara motor.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, geng motor mengaku tidak bisa mengekspresikan hobi berkendara mereka atau balapan di arena resmi di Kota Makassar. Mereka mengetahui bahwa di Kota Makassar terdapat arena balapan resmi, yaitu di Kompleks Trans Studio, tetapi anggota geng motor yang sebagian besar berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu membayar arena balapan tersebut. Sehingga dengan alasan tersebut, mereka sering melakukan balapan di jalan umum. Mereka melakukan balapan yang tidak resmi atau biasa disebut balapan liar di waktu tengah malam atau subuh, di mana lalu lintas sedang sepi. Pada kondisi itulah, seringkali terjadi aksi kriminal lainnya yang dilakukan anggota geng motor seperti perkelahian, penjarahan, dan pencurian.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah bisa memfasilitasi keinginan anggota geng motor untuk diberikan arena balapan resmi yang terjangkau oleh segala kalangan sebagai tempat menyalurkan hobi berkendara motor bagi mereka. Sehingga tidak menutup kemungkinan, bakat anggota geng motor bisa menjadi atlet balap motor yang hebat di masa depan.

f. Minimnya Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi fakta bahwa berbagai tindak kriminal dapat dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan para pelaku, termasuk anggota geng motor.

Berdasarkan data pada tabel 5 sebelumnya, diperoleh bahwa tingkat pendidikan pelaku mulai dari jenjang pendidikan SMP, SMU, dan SMK. Fakta yang diperoleh ini membuktikan bahwa anak dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki potensi yang besar untuk dipengaruhi untuk melakukan aksi kriminal. Usia yang masih sangat muda dan rasa ingin tahu yang besar serta tingkat pendidikan yang rendah bisa menjadi celah masuknya pengaruh-pengaruh negatif ke dalam pikiran anak tersebut, sehingga anak tersebut akan melakukan hal-hal yang negatif juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Cakra (17 tahun) pada 25 November 2015, didapati bahwa ada orang dewasa yang tergabung dalam geng motor. Mereka inilah yang mengarahkan dan mengajarkan hal-hal negatif kepada anggota geng motor untuk melakukan aksi kriminal. Kemudian, sebagian besar anggota geng motor adalah anak yang putus sekolah. Mereka putus sekolah dengan alasan tekanan ekonomi dan juga keinginan sendiri untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

Menurut penulis, anak putus sekolah karena keinginan anak tersebut untuk berhenti sekolah pasti mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang sebagian besar masyarakatnya tidak sekolah dan rawan terjadi aksi kriminal. Hadirnya lingkungan seperti itu, secara langsung akan berdampak negatif kepada anak, sehingga mereka cenderung ikut-ikutan kepada teman atau orang dewasa yang memiliki perilaku buruk. Mereka berkumpul,

membentuk geng motor, dan melakukan aksi kriminal untuk mendapatkan keinginannya.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan solusi untuk memberikan pemahaman yang cukup terhadap anak yang menjadi anggota geng motor, sehingga mereka dapat membedakan mana tindakan yang baik dan buruk. Harapan yang dituju adalah terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera.

g. Media Massa

Media massa yang dimaksud adalah media cetak dan media elektronik. Berdasarkan pengamatan dan pembagian kuisioner yang dilakukan dan disebar di Polrestabes Makassar, Polsek Rappocini dan Polsek Biringkanaya ke beberapa aparat kepolisian, ditemukan bahwa media massa, khususnya media internet dan TV, memberi pengaruh buruk bagi seseorang untuk melakukan aksi kriminal.

Dengan menonton TV, seseorang, khususnya anak, terpengaruh tontonan seperti kasus kekerasan, perkosaan, penganiayaan. Setiap hari anak bisa mengonsumsi dan mendapatkan akses film porno melalui *Mobile Phone* dan warung internet yang juga bisa merangsang anak untuk berbuat asusila. Selain itu, media cetak berupa buku-buku dan majalah porno yang mudah didapatkan bersama dengan kaset/CD, juga kian meracuni pikiran seseorang untuk berbuat tindak kriminal.

Kita tidak dapat mengelak dari fakta bahwa saat ini anak-anak dan remaja dengan bebasnya dapat melihat berbagai adegan kekerasan melalui media cetak ataupun elektronik seperti televisi dan juga *games* atau permainan

yang bertema kekerasan. Tontonan kekerasan seperti perkelahian dan pembunuhan dapat melahirkan rangsangan dan memancing anak dan remaja untuk meniru model kekerasan tersebut.

Penulis menemukan fakta dalam kehidupan masyarakat bahwa anak-anak memiliki kadar agresifitas yang cenderung bertindak keras terhadap anak lain setelah menyaksikan adegan kekerasan dan meningkatkan agresifitas dalam kehidupan sehari-hari serta adanya kemungkinan efek ini sifatnya menetap.

Usia anak yang masih sangat muda sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan anak sebagai objek eksploitasi dengan memberi pengaruh buruk melalui media internet dan elektronik. Oleh karena itu, perlu kesadaran semua pihak masyarakat dalam menjaga anak sebagai penerus bangsa.

2. Upaya Memberantas Kriminalitas Geng Motor

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Tamalanrea, khususnya di depan kampus Universitas Hasanuddin, ada beberapa anggota geng motor yang melakukan balapan liar pada malam hari sekitar jam 02.00 wita malam, sehingga banyak warga sekitar yang merasa terganggu, dan pengguna jalan lainnya tidak bisa menggunakan kecepatan di atas rata-rata karena kelompok geng motor menghalangi pengguna jalan di malam hari.

Kemudian dari hasil wawancara langsung terhadap Supardi, salah seorang warga Tamalanrea, pada 30

November 2015, didapati bahwa keberadaan geng motor sudah sangat mengganggu ketentraman masyarakat karena sering terlibat tindak pidana kriminal, untuk itu perlu agar segera dibubarkan dan ditumpas oleh pihak yang bawenang.

Selanjutnya, hasil wawancara langsung terhadap Udin (30 tahun), salah seorang warga Kec. Rappocini, pada 30 November 2015, didapati suatu harapan bahwa dengan keberadaan kelompok anggota geng motor di Kota Makassar, maka aparat penegak hukum (polisi) perlu melakukan tindakan agar kelompok anggota geng motor tidak melakukan lagi tindakan kekerasan.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar, yaitu dengan:⁸⁷

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal;
- b. Membuat pos jaga di sekitar wilayah rawan tindak kriminal utamanya tindak kekerasan anggota geng motor;
- c. Melakukan mediasi upaya perdamaian kedua belah pihak yang bertikai;
- d. Upaya menciptakan sosok tokoh yang dipanuti dalam masyarakat.

Sedangkan kendala dalam upaya meminimalisir terjadinya aksi kriminal geng motor, yaitu:⁸⁸

⁸⁷Ismail, "Hasil Wawancara."

⁸⁸Ismail, "Hasil Wawancara," pada 24 November 2015.

- a. Tidak ada sosok panutan masyarakat yang disegani;
- b. Masyarakat sekitar cenderung bersikap pasif dan apatis ketika melihat terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan anggota geng motor di Kota Makassar karena takut menjadi sasaran pelaku selanjutnya.
- c. Wibawa aparat keamanan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat.
- d. Tingkat pendidikan yang rendah membuat upaya sosialisasi oleh pihak aparat tidak bekerja dengan baik
- e. Tingginya tingkat penyebaran dan konsumsi minuman keras.

E. Moderasi Dalam Diskresi Kepolisian

1. Prinsip Diskresi Kepolisian dan Moderasi Beragama

Indonesia adalah negara hukum, yang dalam melakukan tindakan harus didasari dengan dasar hukum. Sedangkan, setiap dasar hukum harus memiliki landasan atau prinsip yang mendukung diadakannya tindakan tersebut. Hal ini berlaku juga terhadap diskresi yang dilakukan anggota kepolisian.

Diskresi kepolisian sebagai suatu tindakan yang sepenuhnya diberikan kepada setiap anggota kepolisian untuk mengambil tindakan, namun tetap harus didasari oleh

prinsip-prinsip yang manusiawi. Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan apa dan bagaimana diskresi itu dilakukan, namun belum secara efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Maka dari itu, penulis mengombinasikan prinsip moderasi beragama dalam implementasi atau penerapan kepolisian. Hal ini sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang multikultural, namun tetap dipersatukan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip dasar dari moderasi beragama adalah Adil dan Berimbang yang sangat relevan dengan prinsip dari diskresi kepolisian.

Prinsip yang pertama adalah adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.⁸⁹ Dalam moderasi beragama, prinsip adil ini maksudnya adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Keadilan dalam moderasi beragama sama dengan semangat keadilan yang dimiliki pakar hukum barat yang juga menyatakan demikian, seperti John Rawls yang menjelaskan bahwa keadilan adalah keadaan yang seimbang

antara usaha dan hasil yang diperoleh.⁹⁰ Relevansi yang nyata yang dapat kita lihat adalah pemahaman anggota kepolisian terhadap prinsip keadilan ini. Jika dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk hubungan kepada Tuhan dan manusia tidak berjalan dengan baik, maka individu tersebut cenderung tidak mampu berlaku adil.

Prinsip kedua adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, namun tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas dan merugikan hak orang lain. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acap kali dilupakan oleh umatnya. Padahal, *wasathiyah*

⁹⁰Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>, hlm. 140.

merupakan esensi ajaran Islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antar manusia yang lebih luas.⁹¹

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama yang selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai, sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan dan bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri, yang kemudian memiliki keberanian mengakui kebenaran tafsir orang lain dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat perilaku moderasi

⁹¹Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, hlm. 20.

beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah.

Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama, tentunya akan memudahkan umat untuk memilih alternatif andai umat membutuhkannya. Namun, tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau 'memudah-mudahkan' sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya umat itu harus benar-benar memahami teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram dan mentenramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Terpenuhinya kriteria di atas, maka seorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka khususnya dalam menyikapi keragaman dan perbedaan, dan inilah sesungguhnya salah satu hakikat dari moderasi beragama. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural

seperti Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keragaman, baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal.

2. Moderasi Dalam Penerapan Diskresi Kepolisian

Kata moderasi berasal dari kata latin “*moderatio*” yang berarti kesedangan yang dapat diartikan tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan kata moderasi pengertian sebagai suatu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.⁹²

Dalam penerapannya, diskresi kepolisian tidak serta merta dapat dilakukan. Kondisi tertentu harus terpenuhi, seperti adanya kekosongan hukum yang mengatur, kaburnya aturan, harus melihat asas-asas umum pemerintahan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Melihat relevansi dari moderasi Beragama dengan prinsip adil dan seimbang, maka moderasi beragama tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam diskresi kepolisian.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.⁹³ *Pertama*, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-

⁹²Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, hlm. 15.

⁹³Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, hlm. 28.

mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan, penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Ketiga pilar tersebut dapat diinternalisasi secara bertahap bagi anggota kepolisian karena diskresi kepolisian merupakan wewenang dari setiap anggota kepolisian. Berikut adalah cara untuk menginternalisasikan moderasi Beragama dalam penerapan diskresi kepolisian:

a. Mempelajari Ilmu Agama dengan Baik

Setiap agama di dunia mengajarkan untuk melakukan kebaikan dan menolong sesama manusia. Belajar kembali dan memperdalam pemahaman tentang agama adalah hal

positif yang menaikkan tingkat keimanan seseorang, tidak terkecuali aparat kepolisian.

Polisi sebagai umat beragama dalam melakukan diskresi kepolisian harus mampu membedakan yang benar dan salah. Contohnya, pada tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana berat yang termasuk sulit untuk ditangani. Hal ini disebabkan berbagai modus yang digunakan dengan atribut agama lambat laun dapat melahirkan stigma negatif masyarakat kepada kelompok lain yang penampilannya dari luar, seperti pelaku teror atau teroris.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota kepolisian tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang tergesa-gesa, contohnya jika melihat warga masyarakat yang ciri-ciri fisiknya seperti pelaku teror, polisi tidak dapat langsung menangkapnya, tetap harus dengan bukti yang cukup. Ketika polisi tersebut melakukan penangkapan tanpa disertai bukti, maka polisi tersebut dapat diberikan sanksi.

b. Meningkatkan Intensitas dengan Masyarakat

Kepolisian telah membagi tugas dan wewenang tiap anggotanya, ada polisi lalu lintas, penyidik, unit reserse kriminal umum, unit reserse kriminal khusus, dan sebagainya. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, polisi yang sering turun ke lapangan adalah polisi lalu lintas karena memang tugasnya menjaga arus lalu lintas. Pertanyaan selanjutnya, mana polisi lain yang jumlahnya begitu banyak?

Jika dibandingkan dengan Negara maju, seperti Jepang, di mana jumlah rasio polisi dan masyarakatnya adalah 1:520

yang mengartikan bahwa tiap 1 polisi bertugas menjaga 520 warga sipil, maka rasio tersebut sangat berbeda jauh Indonesia sebesar 1:1700.⁹⁴ Artinya, tiap 1 anggota polisi bertanggungjawab terhadap 1.700 warga sipil. Kita dapat membayangkan betapa luas dan padatnya penduduk Indonesia, namun hal tersebut bukanlah halangan dalam memberikan perlindungan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Melihat fakta tersebut, maka penulis merekomendasikan agar tiap anggota kepolisian wajib turun ke lapangan, yaitu masyarakat. Tujuan dari hal tersebut adalah agar tiap individu di kepolisian memiliki pengalaman dan pemahaman yang sama dengan kondisi *real* di masyarakat.

c. Bersikap Imparsial

Seorang anggota kepolisian harus bersifat netral dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari peran eksekutif yang merupakan bagian dari pemerintahan. Sikap netral tersebut akan melahirkan sikap tidak memihak atau imparsial.

Contoh yang dapat kita lihat adalah ketika kita membandingkan tindakan penyidik kepolisian dalam menangani suatu kasus perkara pidana besar dan kecil. Penyidik untuk perkara pidana besar, seperti kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penyidik cenderung lunak atau lembek dalam bertindak, tidak cepat respon, tertutup, dan lambat dalam menyelesaikan perkaranya.

⁹⁴Astri Wahyuni, "Rasio Polisi Dan Masyarakat 1 : 1700," Tempo.co, 2005.

Sedangkan perkara pidana kecil seperti pencurian di pasar, maka pelaku akan segera ditindak tegas dengan sanksi yang tegas. Di sinilah kita dapat melihat perbandingan penerapan diskresi yang tidak adil, diskriminatif dan tidak imparial, yang ujung-ujungnya menyatakan bahwa hal tersebut adalah diskresi kepolisian demi kepentingan proses perkara.

Perbandingan di atas tidak akan terjadi jika tiap anggota kepolisian bersikap adil dan berimbang dalam melakukan diskresi. Diskresi mampu memberikan pengampunan dan kemakluman, sebaliknya juga mampu memberikan pemberatan tergantung kondisi di lapangan. Maka dari itu, sikap imparial sangat penting dimiliki oleh seorang anggota kepolisian.

d. Bersikap Seimbang

Sikap seimbang bermakna bahwa tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Contohnya adalah tindakan terhadap pelaku pencurian dengan nilai yang sangat rendah, seperti kasus pencurian oleh seorang nenek Minah di Kabupaten Banyumas yang divonis bersalah oleh pengadilan dan menjalani hukuman penjara selama 1 bulan hanya karena mencuri 3 buah kakao.⁹⁵ Dalam kasus ini, diskresi anggota kepolisian yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan

⁹⁵Muhammad Ridlo, "Mbok Minah Dan Catatan Hitam Peradilan Di Hari Kehakiman," *Liputan6*, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3901107/mbok-minah-dan-catatan-hitam-peradilan-di-hari-kehakiman>, Diakses pada 19 Juli 2020.

penyelesaian masalah dengan cepat menggunakan prinsip *restorative justice*.⁹⁶ Prinsip ini mengedepankan pemulihan kerugian yang terjadi sebesar nilai objek tindak kriminal, sehingga anggota kepolisian dengan sikap seimbang yang melihat nilai objek kakao tersebut seharusnya tidak perlu melanjutkan proses perkara pidana nenek tersebut.

Beda halnya jika objek tindak kriminal yang dilakukan geng motor yang besar, bahkan sampai menelan korban jiwa. Meskipun dilakukan oleh pelaku yang kategorinya termasuk anak di bawah umur, tetapi anggota kepolisian tetap harus tegas dalam bersikap. Sikap tersebut dapat terlihat jika oknum polisi tidak melakukan kekerasan kepada pelaku geng motor, tetapi lebih memberikan pendekatan agama atau spiritual. Selain itu, dengan memanggil orang tua pelaku dan melanjutkan perkara pidananya jika diversifikasi tidak mencapai kesepakatan.⁹⁷

Sikap seimbang tersebut tidak hanya dilakukan pada saat bekerja, tetapi juga bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan yang ada dari kehidupan sekitar kita akan terbawa ke dalam praktek mengerjakan tugas sehari-

⁹⁶Edward J Gumz and Cynthia L Grant, "Restorative Justice: A Systematic Review of the Social Work Literature," *Families in Society* 90, no. 1 (January 1, 2018): 119–126, <https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853>, hlm. 124.

⁹⁷Shannon Lange, Jürgen Rehm, and Svetlana Popova, "The Effectiveness of Criminal Justice Diversion Initiatives in North America: A Systematic Literature Review," *International Journal of Forensic Mental Health* 10, no. 3 (2011): 200–214, <https://doi.org/10.1080/14999013.2011.598218>, hlm. 205.

hari, sehingga semua akan berjalan lancar dan sesuai rencana.

e. Bersikap Independen

Independen adalah suatu bentuk kemandirian dan bebas dari segala intervensi. Konsep adil dan berimbang dalam moderasi beragama perlu ditambahkan dengan sikap independen.

Diskresi merupakan suatu tindakan yang perlu pemahaman yang baik tentang teori dan lapangan. Namun, tantangannya adalah kepolisian sebagai suatu instansi vertikal dengan sistem komando yang berarti sangat memegang sistem hierarkis.

Perintah atasan merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena tidak melaksanakan perintah atasan merupakan pelanggaran berat dalam institusi kepolisian. Dinamika yang terjadi di lapangan, terkadang tidak sesuai teori atau perintah atasan menuntut seorang anggota kepolisian untuk mampu mengambil tindakan yang hati-hati. Di sinilah letak independensi yang harus diperhatikan. Menurut penulis, melakukan diskresi yang tidak sesuai perintah atasan dapat dilakukan selama keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Contohnya adalah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Polisi selalu diturunkan untuk menjaga keamanan dan menertibkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selama demonstrasi tersebut berjalan lancar, maka semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun beda halnya ketika demonstrasi berjalan anarkis dan

merusak fasilitas umum. Pada situasi tersebut, seorang anggota polisi harus mampu menjaga proses demonstrasi berjalan tertib tanpa melakukan kekerasan bahkan melukai para demonstran sebagaimana perintah atasan.

f. Demi Kepentingan Umum

Nomenklatur kepentingan umum sudah sangat sering kita lihat dan dengar sehari-hari. Kepentingan umum memiliki makna untuk kepentingan sebagian besar masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat demokrasi, seperti Indonesia merupakan hal yang penting untuk melakukan sesuatu demi kepentingan umum, tidak terkecuali diskresi kepolisian. Moderasi beragama dengan prinsip adil dan berimbang juga mengarahkan segala tindakan yang dilakukan aparat kepolisian agar dilakukan demi kepentingan umum. Hal ini juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

Contoh dari implementasi kepentingan umum ini adalah ketika kepolisian melakukan razia kendaraan bermotor, maka seyogyanya kepolisian melakukannya tanpa diskriminasi, yaitu tidak melihat dari jenis kendaraan yang digunakan, pekerjaan pengendara, dan sebagainya.

Teori regulasi kepentingan publik menyatakan bahwa regulator berusaha menemukan solusi pasar yang efisien secara ekonomi. Ia berpendapat bahwa kekuatan pasar perusahaan di pasar persaingan yang tidak sempurna harus dikendalikan. Dalam kasus monopoli alami, regulasi dipandang perlu untuk menurunkan harga dan meningkatkan output. Dalam kasus industri oligopolistik,

regulasi sering digunakan untuk mencegah persaingan yang kejam.

Teori regulasi kepentingan publik juga berpendapat bahwa perusahaan mungkin harus diatur untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa tertentu seperti listrik, fasilitas medis, dan layanan telepon yang jika tidak, tidak akan cukup menguntungkan untuk mendorong perusahaan yang tidak diatur untuk menyediakannya di komunitas tertentu. Perusahaan yang menyediakan barang dan jasa tersebut sering kali diberikan lisensi dan waralaba yang mencegah persaingan. Otoritas pengaturan mengizinkan perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya rata-rata di pasar yang dilindungi untuk menutupi kerugian di komunitas sasaran. Dengan cara ini, perusahaan diizinkan untuk mendapatkan, memang dijamin, tingkat pengembalian yang wajar secara keseluruhan.

Para pendukung teori kepentingan publik juga membenarkan regulasi perusahaan dengan menunjuk pada eksternalitas, seperti polusi, yang tidak dipertimbangkan ketika perusahaan yang tidak diatur membuat keputusan mereka. Seperti yang telah kita lihat, dengan tidak adanya hak milik yang memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan semua biaya dan manfaat dari keputusan mereka, pasar mungkin gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien.

g. Internalisasi Pada Proses Penanganan Perkara

Proses penanganan perkara di kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses perkara di Indonesia melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian
- 2) Penuntutan di Kejaksaan
- 3) Pemeriksaan di Pengadilan

Selain itu, pada institusi Kepolisian terdapat prosedur penanganan perkara yang diatur dalam KUHP. Proses tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan

Penyelidikan merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ketentuan tentang penyelidikan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, di mana penyelidikan adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang terjadi adalah suatu tindak pidana atau bukan.

Penyelidikan merupakan tahap di mana kepolisian memiliki wewenang penuh dalam prosesnya. Kasus-kasus yang berat hingga ringan akan diinventarisir kemudian dilakukan pemeriksaan, mulai dari barang bukti dan alat bukti. Besarnya kewenangan kepolisian pada tahap ini menjadi rawan untuk disalahgunakan, maka dari itu diperlukan instrumen pencegahan yang dapat dilakukan. Instrumen tersebut adalah moderasi beragama.

Tiap individu aparat kepolisian yang merupakan individu beragama perlu selalu diingatkan tentang tanggung jawab tugas mereka. Bukan hanya tanggung jawab di dunia, tetapi juga tanggung jawab di akhirat. Misalnya, ketika

aparatus kepolisian memeriksa perkara yang melibatkan sesama anggota kepolisian, maka penyidik wajib secara profesional memproses perkara tersebut sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat warna seragam.

2) Penyidikan

Proses selanjutnya setelah penyelidikan adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari alat bukti, tersangka, dan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik yang juga merupakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pada fase ini, suatu perbuatan telah resmi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan. Pekerjaan penyidik dalam menangani kasus perkara pidana dimulai dengan mencari tersangka. Kadang kala pencarian tersangka mendapatkan banyak hambatan, seperti tersangka yang telah melarikan diri ke daerah lain, jarak tempuh tempat penangkapan tersangka yang jauh, dan salah tangkap (*error in persona*).

Kewenangan kepolisian pada tahap penyidikan sangat besar, sehingga pada prakteknya banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Apabila terjadi kesalahan dalam penyidikan, seperti pemberhentian penyidikan dan penetapan tersangka, maka dapat diajukan praperadilan.

3) Penangkapan

Penangkapan adalah upaya yang dilakukan penyidik dengan mengekang sementara kebebasan tersangka atau

orang yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan tentang prosedur penangkapan ini diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP. Ketika aduan atau laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana masuk ke kepolisian, aparat kepolisian tidak boleh serta-merta melakukan penangkapan. Prosedur yang harus dilakukan adalah harus melalui tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian dibekali dengan surat perintah penangkapan dari atasan penyidik.

Aparat kepolisian dengan segala kewenangannya, terkadang langsung melakukan penangkapan tanpa mampu memberikan penjelasan kepada yang ditangkap dan keluarganya. Akibatnya konflik biasanya terjadi antara keluarga tersangka yang akan ditangkap dengan penyidik yang akan melakukan penangkapan. Lagi-lagi moderasi Beragama dapat memberikan efek positif bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, termasuk pada tahap penangkapan ini.

Contohnya adalah geng motor. Tindak kriminal yang biasa dilakukan geng motor, seperti pencurian dengan kekerasan, atau yang lebih dikenal dengan pembegalan, perlu diberikan tindakan tegas oleh kepolisian. Namun di sisi lain, geng motor yang berisi remaja dan anak membutuhkan perlakuan khusus dari aparat kepolisian. Polisi tidak dapat melakukan kekerasan, selain melanggar prosedur juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari anak tersebut. Anak yang menjadi anggota geng motor juga dapat dikategorikan sebagai pelaku sekaligus korban. Adanya orang dewasa yang memberikan contoh buruk,

pengaruh lingkungan, dan sebagainya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat mengakibatkan munculnya tindakan kriminalitas geng motor.

4) Penahanan

Tahap penahanan adalah proses ditahannya seseorang demi kepentingan penanganan perkara. Penahanan yang dapat dilakukan oleh kepolisian diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP. Penahanan dapat dilakukan oleh setiap instansi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Institusi kepolisian juga berwenang melakukan penahanan paling lama 110 hari yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap ini, aparat kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan baik dengan menerapkan prinsip adil dan berimbang. Proses penahanan tidak boleh melihat status tersangka, sehingga penahanan harus dilakukan tanpa pandang bulu dan sesuai prosedur. Landasan moderasi beragama akan membuat tiap individu kepolisian dapat dengan hati-hati, adil, dan berimbang dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan penahanan.

5) Penggeledahan dan Penyitaan

Pengeledahan adalah tindakan memeriksa rumah atau badan tersangka, sedangkan penyitaan adalah tindakan mengambil barang yang terkait dengan perbuatan pidana. Dalam proses ini, aparat kepolisian yang dibekali dengan prinsip moderasi beragama akan menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa kasus pernah terjadi tentang kesalahan aparat kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Kesalahan yang biasa terjadi adalah barang yang tidak terkait dalam perbuatan pidana juga ikut disita. Misalnya, kendaraan atau uang tunai yang disita sebenarnya adalah milik orang lain yang tidak terkait dengan perbuatan pidana tersangka, namun hal tersebut tetap dilakukan demi kelancaran proses penanganan perkara. Selanjutnya, terkadang nasib barang yang disita tidak jelas atau malah rusak. Kejadian seperti ini biasanya terjadi pada barang seperti kendaraan yang jika tidak dinyalakan atau digunakan, maka biasanya berkarat atau rusak. Sedangkan sanksi bagi aparat kepolisian yang melakukan kesalahan tersebut belum diatur secara jelas.

3. Manfaat Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian dalam Masyarakat Multikultural

a. Memuaskan Masyarakat

Berdasarkan hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian menunjukkan tren negatif pada sepanjang tahun 2019. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri tahun 2019 berada di angka 72,1%. Sedangkan, hasil survei LSI tahun 2018, angka kepercayaan masyarakat mencapai angka 87%. Demikian juga dengan survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada 2019 memberikan Polri angka 58,7 di bidang penilaian kinerja.⁹⁸

⁹⁸Ichsan Emrald, "Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Polri Menurun," *Republika Online*, 2019,

Hasil survei tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari keraguan masyarakat ketika kepolisian menangani suatu perkara, adanya anggota kepolisian yang menggunakan narkoba, dan seringnya ada korban dari warga sipil ketika terjadi demonstrasi.

Moderasi beragama dapat menjadi solusi atas ketidakpuasan masyarakat. Seorang anggota kepolisian yang memiliki pemahaman agama yang baik dapat membangun kesepahaman antara pola pikir aparat kepolisian dan masyarakat. Hal ini tentu akan membantu kepolisian dan masyarakat untuk saling mengerti. Ketika terjadi suatu konflik di lapangan, maka aparat kepolisian dapat dengan cepat dan mudah merespon dan mengambil tindakan diskresi sesuai dengan harapan masyarakat. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka masyarakat akan mudah memahami dan memaafkan aparat kepolisian karena mereka paham situasi yang dihadapi oleh aparat kepolisian.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap insitusi kepolisian juga disebabkan oleh adanya kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian sebagai pelaku kejahatan, namun proses pemeriksaannya terkesan lambat dan ditutup-tutupi. Contohnya adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Kasus tersebut masih bergulir hingga menempatkan oknum aparat kepolisian

sebagai tersangka. Serentetan kasus lain yang melibatkan oknum di institusi kepolisian menjadi *boomerang* bagi kepolisian yang terus menggerus nama baik kepolisian.

Moderasi beragama harus menjadi kewajiban bagi setiap aparat kepolisian. Tidak hanya bagi individu polisi tersebut, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat. Kepolisian dalam menjalankan peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menuntun dan membimbing masyarakat dengan berdasar pada agama, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Adanya bagian rohis atau rohaniawan pada institusi kepolisian sangat diperlukan, tidak hanya untuk bagian rohis itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh aparat kepolisian.

b. Mendekatkan Kepolisian dengan Masyarakat

Polisi hadir untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat. Jika kepolisian kehilangan kepercayaan publik, maka semua yang dikerjakan kepolisian akan sia-sia. Maka dari itu, kepolisian harus menggunakan pendekatan yang mudah diterima oleh masyarakat.

Pendekatan agama dengan moderasi beragama melalui prinsip adil dan berimbang merupakan jawabannya. Tiap aparat kepolisian tidak hanya harus menambah pengetahuan agamanya, tetapi juga harus mengamalkannya dengan berbaur dengan masyarakat, seperti ke masjid-masjid, melakukan dakwah sekaligus sosialisasi tentang kinerja dan program kerja kepolisian.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kaya akan budaya atau multikultural, sehingga diperlukan suatu pendekatan khusus yang mampu merangkul semua perbedaan. Pendekatan agama merupakan cara yang mampu mendekatkan masyarakat dan kepolisian, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Contoh nyata yang dapat dilakukan adalah pada kegiatan kerja bakti. Kerja bakti adalah momen di mana masyarakat berkumpul untuk bekerjasama dan gotong royong melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Di situ juga muncul keberagaman, seperti keragaman agama, keragaman pekerjaan, hingga keragaman suku, dan sebagainya. Insitusi kepolisian sebaiknya ikut dalam setiap kegiatan kerja bakti tersebut, tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut serta membantu langsung di lapangan.

Selanjutnya, dalam mendekatkan kepolisian dengan masyarakat adalah dengan jalan setiap aparat kepolisian harus memiliki kemampuan berdakwah. Dakwah adalah kewajiban bagi semua umat manusia untuk menyampaikan dan menyebarkan ajaran agama kepada orang lain, tidak terkecuali aparat kepolisian.

Hal tersebut sangat penting dipenuhi, utamanya polisi yang bertugas sebagai babinkamtibmas di pedesaan. Karakter masyarakat desa yang komunal atau tingkat kebersamaannya yang tinggi akan mudah didapatkan perhatian dan simpatinya dengan jalan dakwah.

Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan prinsip adil dan berimbang dari moderasi beragama, maka rakyat kecil hingga masyarakat luas akan senang terhadap kepolisian. Pada akhirnya, masyarakat akan membantu pekerjaan kepolisian dan selalu mendukung kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

c. Menciptakan Masyarakat Kaum Milenial Yang Moderat

Istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great Generation* (2000). Mereka menciptakan istilah ini tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000. Pendapat lain menurut Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom* (2008), generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada *Generation Theory* yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993.⁹⁹

⁹⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), hlm. 14.

Di samping intelektual mancanegara, ada beberapa pendapat tentang generasi milenial dari intelektual dalam negeri. Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi dalam bukunya “Millennial Nusantara”, bahwa Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Sementara para intelektual sosial dalam negeri lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi milenial.¹⁰⁰

Secara fisik dan mental, generasi milenial kemungkinan adalah generasi yang mengalami kesehatan lebih buruk di usia paruh baya, dibandingkan orang tua mereka/generasi *baby boomers*. Penelitian yang dilakukan oleh *Healty Foundation* pada tahun 2017 menyebutkan bahwa masalah pekerjaan, hubungan, dan rumah tangga yang sekarang mempengaruhi orang-orang berusia 20-an dan 30-an sebagai faktor yang dapat menyebabkan risiko lebih tinggi untuk mengalami beberapa gangguan seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung di kemudian hari. Secara keseluruhan, tren ini berkaitan dengan stres jangka panjang, kecemasan, depresi atau kualitas hidup yang lebih rendah. Laporan tersebut juga menemukan bahwa generasi milenial adalah generasi pertama yang mendapatkan uang lebih sedikit dari pada orang tua mereka pada usia mereka.

Generasi milenial paling banyak mengalami tekanan kehidupan dan pekerjaan. Pola revolusi industri 4.0 menuntut perusahaan bekerja lebih cepat serta kondisi

¹⁰⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm. 16.

perekonomian yang kurang stabil dan faktor asupan makanan menjadi faktor yang berpengaruh kepada kesehatan mental para generasi milenial. Generasi ini lebih cenderung *self centered* dan ingin menjadi pusat perhatian. Sebenarnya kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan media sosial. Jurnal *Psychological* menyebutkan bahwa gangguan mental di kalangan milenial terjadi akibat tingginya sikap perfeksionis. Generasi milenial melihat bahwa perfeksionis sebagai orientasi utama. Kesempurnaan atau tekanan di media sosial akan mempengaruhi status sosial, sehingga mereka mengalami *multidimensional perfectionism* atau sebuah tekanan untuk mendapatkan standar lebih tinggi.¹⁰¹

Dimensi Psikologis, sosial serta spiritual generasi milenial di masa revolusi industri 4.0 sangat dipengaruhi oleh teknologi media sosial. Penjelasan di atas sedikit memberi gambaran bagaimana perkembangan diri milenial ditandai dengan *self disclosure* atau keterbukaan diri. Menurut Anderson, ada tujuh tanda kematangan psikologis orang dewasa awal/generasi milenial, yaitu berorientasi pada tugas, memiliki tujuan yang jelas serta kebiasaan kerja yang efisien, mengendalikan perasaan pribadi, bersikap objektif, menerima kritik dan saran, bertanggungjawab terhadap usaha pribadi dan menyesuaikan diri dengan situasi baru.

¹⁰¹R Willya Achmad W et al., "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2020): 187–197, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>, hlm. 191.

Menurut penulis, istilah kaum milenial adalah masyarakat yang mampu menggunakan gawai dengan baik, tidak melihat tahun berapa ia lahir. Kemudian bagaimana hubungan kaum milenial dengan masyarakat moderat?

Kaum milenial saat ini sangat mahir menggunakan teknologi dan *update* informasi. Banyaknya informasi yang beredar malah membuat bingung masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sinilah peran moderasi beragama.

Moderasi Beragama dapat mengarahkan kaum milenial untuk tidak serta-merta mempercayai suatu informasi tanpa melakukan konfirmasi atau yang disebut *tabayyun*. Selain itu, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama dapat membimbing kaum milenial untuk menjadi pribadi yang kuat dan tidak kaku. Hal yang dimaksud adalah pribadi yang memiliki karakter kuat dengan prinsipnya, namun tidak kaku dalam menerima perkembangan zaman.

d. Mencegah Radikalisme dan Terorisme

Istilah radikalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer, radikalisme adalah inti dari perubahan. Sementara radikalisme agama berarti, perilaku keagamaan yang menyalahi syariat, yang mengambil karakter keras sekali antara dua pihak yang bertikai yang bertujuan merealisasikan target-target tertentu, atau bertujuan merubah situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama. Dari konteks di atas, dapat dipahami bahwa radikalisme agama adalah perilaku keagamaan yang

menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu.¹⁰²

Sedangkan radikalisme adalah suatu tindakan lanjutan dari pemikiran radikal. Berbagai contoh kasus radikalisme dan terorisme sudah banyak terjadi di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang dapat menghindarkan masyarakat pada paham radikal, apalagi perbuatan terorisme.

Pemerintah sempat dibuat pusing begitu terjadi aksi terorisme di Bali pada 12 Oktober 2002. Kalang kabut pemerintah cukup beralasan karena Indonesia memang pada saat itu belum mempunyai undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun sekarang, sejak 18 Oktober 2002, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini dikukuhkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme) dan dilengkapi dengan Perpu No. 2 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.¹⁰³

¹⁰²Ahmad Asrori, "RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2017): 253–268, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>, hlm. 258.

¹⁰³Ali Masyhar and Ridwan Arifin, "Urgensi Pembentengan Masyarakat Dari Radikalisme Dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)," *Jurnal*

Indonesia sebagai Negara yang multikultural, memiliki beragam adat dan budaya yang merupakan kelebihan sekaligus kelemahannya. Kelebihan dari masyarakat multikultural adalah beragamnya warna yang melahirkan banyak dinamika kehidupan yang menjadi sumber wawasan baru, sehingga akan menumbuhkan toleransi yang tinggi. Sebaliknya, kelemahan dari masyarakat multikultural adalah banyaknya pribadi dengan berbagai karakter dari beragam adat dan budaya akan menjadi malapetaka jika terjadi egoisme, baik yang berlatar suku, ras, agama, dan lain-lain.

Dalam kerangka mencegah pengaruh radikal dan terorisme ini, para tokoh agama dan lintas tokoh lainnya tidak boleh tinggal diam dan bersikap netral tetapi harus ada sebuah bentuk keberpihakan terhadap realitas kehidupan. Untuk melawan radikalisme dan terorisme sebagai suatu kekuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat internasional, nasional maupun lokal, maka komunitas agama-agama bersama tokoh agama dan lintas tokoh lainnya tak akan pernah mengambil alih tugas institusi kenegaraan. Namun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda serta komunitas-komunitas agama memiliki:¹⁰⁴

Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI 1, no. 01 (2018): 1–12, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27259>, hlm. 2.

¹⁰⁴H. Ahmad Jubaidi, Nanik Pujiastuti, and Salasiah, “Pencegahan Paham Terorisme Dan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Timur,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–4,

- 1) Sikap interdependen, solidaritas dan empati, serta bersatu untuk membentuk *moral force*, yang pada gilirannya mampu menentang kecenderungan para pemimpin politik dunia untuk memanipulasi agama demi keuntungan mereka.
- 2) Para tokoh agama dan lintas tokoh lainnya serta komunitas-komunitas agama harus memiliki tekad (*commitment*) untuk memasuki sejarah baru dalam konteks suatu perubahan yang lebih substantif dan fungsional untuk menjawab berbagai tantangan paradoksal yang dihadapinya secara perenial, terutama pada era reformasi dan globalisasi sekarang ini.
- 3) Para tokoh agama dan lintas tokoh lainnya harus memiliki prakarsa untuk membangun komunitas-komunitas basis yang kuat yang terdiri dari berbagai pemeluk agama yang berbeda tetapi saling percaya, kekuatan komunitas ini untuk mengantisipasi kekerasan baik dari dalam tetapi terutama dari luar lingkungan komunitas itu.
- 4) Tokoh agama dan lintas tokoh dan serta lintas komunitas agama mendorong reformasi di bidang ekonomi, sehingga ekonomi Indonesia

betul-betul menjadi ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan serta pertumbuhannya ditopang oleh stabilitas politik yang menunjang pemerataan dan bernilai tambah (baik kuantitas maupun kualitas).

- 5) Tokoh agama dan lintas tokoh lainnya serta komunitas agama mendorong untuk memberlakukan secara baik *good governance*, agar penyelenggaraan manajemen pembangunan tetap solid dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga terhindarlah salah alokasi dana yang dapat mencegah tindakan korupsi, baik secara politik maupun administratif.

Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain (*non-penal*) bagi penanggulangan terorisme. Untuk bisa menentukan upaya *non-penal* yang tepat dan efektif, perlu dikaji faktor-faktor penyebab yang menimbulkan/mendorong aksi terorisme tersebut.

Maka dari itu, perbedaan tersebut perlu disatukan dengan adanya moderasi beragama. Mengapa? Karena Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan, di mana tidak ada warga negaranya yang tidak beragama, sehingga moderasi beragama sangat tepat digunakan dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

e. Media Pembentuk Moral yang Baik

Saat ini adalah era disrupsi, di mana teknologi semakin berkembang, namun secara bersamaan moralitas menurun. Banyak contoh yang dapat kita lihat di masa kini yang menandakan merosotnya moralitas manusia. Berbagai kasus menyimpang terjadi, seperti pemerkosaan orang tua kepada anak kandungnya, kekerasan dalam rumah tangga, hingga individu yang rela mengambil hutang demi gaya hidup melalui media online.

Moderasi beragama adalah solusi atas masalah moral yang terjadi. Pendekatan agama merupakan jalan terbaik untuk memperbaiki standar moral individu dari dalam karena setiap agama mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Beberapa bukti bahwa agama merupakan jawaban tersebut adalah kasus terorisme, di mana banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota *Islamic State* (ISIS), namun mereka kembali dengan penyesalan. Tentunya, kembalinya mereka tidak serta-merta membuat mereka diterima dengan baik seperti semula. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan pendekatan agama untuk membuat individu yang dulunya adalah teroris menjadi WNI yang cinta tanah air Indonesia kembali.

Setiap agama mengajarkan hidup dengan baik dan tentram, seperti Islam. Islam merupakan agama pemersatu bangsa yang menerima keberagaman untuk hidup bersama dalam wilayah yang sama. Agama Islam membentuk moralitas tiap muslim untuk saling menghargai sesama tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya.

f. Sarana Pemersatu Bangsa

Indonesia yang merupakan salah satu Negara multikultural dengan keberagaman yang melimpah. Begitu banyak suku, agama, dan ras yang hidup bersama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut tentunya melahirkan perbedaan-perbedaan yang rawan menjadi sumber konflik.

Moderasi beragama merupakan penengah yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Contoh nyata yang terjadi adalah konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 yang berkepanjangan, selanjutnya kasus terorisme di Poso adalah bentuk perpecahan yang terjadi. Tidak jarang agama menjadi kedok konflik yang terjadi yang membuat nama baik agama tersebut tercoreng.

Menurut penulis, agamalah yang menjadi pemersatu bangsa melalui moderasi beragama. Prinsip adil dan berimbang bagi tiap individu wajib diterapkan. Kewajiban menjaga keutuhan bangsa merupakan tugas semua warga Negara, terkhusus aparat kepolisian yang menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Diskresi kepolisian dapat dilaksanakan dengan konsep moderasi beragama, di mana perbuatan diskresi tersebut harus dilakukan dengan segala pertimbangan, baik secara teori maupun fakta di lapangan. Penanganan perkara di kepolisian hingga penjagaan keamanan di lapangan merupakan sesuatu hal yang harus dijaga agar tidak melahirkan konflik yang berujung pada perpecahan bangsa.

**g. Meningkatkan Efektivitas Polisi Sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan Pelayan Publik**

Sektor publik terdiri dari serangkaian rezim pekerjaan. Sayangnya, tidak ada definisi standar pegawai negeri sipil. Pengaturan bervariasi antar negara, meskipun umumnya layanan sipil merupakan badan staf yang berbeda dalam sektor publik.

Inti dari status pegawai negeri adalah bahwa dasar hukum untuk pekerjaan, undang-undang dan peraturan yang membentuk sifat kontrak kerja adalah berbeda dari yang ditemukan di tempat lain dalam perekonomian, sebagaimana didefinisikan oleh hukum perburuhan umum. Ini juga umumnya berbeda dari yang ditemukan di tempat lain di sektor publik, seperti di sektor kesehatan atau pendidikan atau di perusahaan milik negara.

Secara historis, pekerjaan pegawai negeri bukanlah perjanjian formal antara dua pihak yang setara, tetapi lebih merupakan keputusan Negara. Saat ini, pekerjaan pegawai negeri cenderung untuk berbagi beberapa fitur yang khas dari pengaturan sukarela antara majikan dan karyawan di sektor swasta. Namun, beberapa kriteria terus membedakan status pegawai negeri sipil dari pengaturan pekerjaan lain.

Kriteria ini dapat diringkas sebagai berikut: pegawai negeri sipil "ditunjuk" oleh keputusan lembaga publik yang berwenang sesuai dengan hukum layanan sipil. Suatu keputusan oleh perwakilan Negara untuk "menunjuk" seorang pegawai negeri harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang menyusun proses perekrutan.

Setelah diangkat, ada banyak kendala pemecatan. Ini karena pegawai negeri sipil bukan hanya pegawai negara; mereka juga memiliki peran konstitusional. Maksud undang-undang layanan sipil adalah untuk menyeimbangkan persyaratan karyawan ini responsif terhadap pemerintah saat itu, dengan persyaratan paralel bahwa mereka menghormati dan memelihara lembaga negara dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keamanan kerja tambahan disediakan untuk mencegah tekanan politik jangka pendek dari mengarah ke perubahan personil yang tidak pantas.

Ada lebih banyak kendala pada tindakan pegawai negeri dari pada kelompok lain. Sekali lagi, ini karena peran strategis dan konstitusional PNS. Konvensi Hubungan Ketenagakerjaan (Layanan Publik), 1982 (No. 151) memberikan perincian tentang hak-hak dasar ketenagakerjaan pegawai negeri (hak untuk berorganisasi, untuk berpartisipasi dalam konsultasi atau negosiasi sehubungan dengan ketentuan kerja mereka dan penyelesaian perselisihan). Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa ketentuannya berlaku untuk "semua orang yang dipekerjakan oleh otoritas publik" tetapi mengizinkan pengecualian untuk "karyawan tingkat tinggi yang fungsinya biasanya dianggap sebagai pembuat kebijakan atau manajerial, atau karyawan yang tugasnya adalah dari sifatnya sangat rahasia".

Pegawai yang bersangkutan berada dalam pemerintahan pusat sipil atau pemerintah daerah. Ada banyak pengaturan pekerjaan lain di sektor publik yang memberikan sesuatu yang mirip dengan status pegawai negeri sipil, di bawah undang-undang karir peradilan dll.

Namun, penggunaan umum mensyaratkan bahwa status pegawai negeri sipil merujuk pada karyawan dalam pemerintah pusat sipil, atau pemerintah daerah. Pengadilan sering dapat dipekerjakan di bawah pengaturan yang juga memberikan hambatan konstitusional berbasis pemberhentian, tetapi jarang dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ada beberapa tanda baru-baru ini bahwa perbedaan antara undang-undang layanan sipil dan hukum perburuhan sedang melunak. Basis data legislasi nasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), NATLEX, berisi referensi bibliografi terhadap undang-undang Negara-negara Anggota ILO yang mengatur layanan sipil.

Masalah definisi disorot oleh musyawarah Komite Bersama ILO tentang Layanan Publik, yang telah mengadakan lima sesi (1970, 1975, 1983, 1988 dan 1994) yang semuanya telah direkam pada beberapa tahap diskusi mengenai definisi. Diskusi-diskusi ini telah mengakui perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil yang sudah mapan (apakah mereka "bertenor", "permanen" "titulerisasi" atau "wajib hukum") dan pegawai negeri tidak mapan yang bekerja sebagai pegawai kontrak Negara. Namun, sejumlah negara memperlakukan semua pekerja layanan publik sebagai karyawan kontrak.

Menerapkan kriteria ini umumnya mengungkapkan sekelompok karyawan di pemerintah pusat sipil dan di pemerintah daerah yang secara luas diakui sebagai pegawai negeri sipil. Tentu saja mungkin bahwa beberapa sektor publik secara efektif semuanya adalah pegawai negeri sipil.

Namun, ini jarang terjadi. Bahkan dalam pengaturan dengan cakupan layanan sipil yang paling komprehensif, karyawan perusahaan milik negara biasanya tunduk pada undang-undang yang berbeda. (Seringkali itu adalah hukum perburuhan umum yang sama yang mengatur kontrak kerja di sektor swasta.)

Oleh karena itu, peran kepolisian sebagai institusi pelayan publik yang juga merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sangat penting. Hal tersebut harus dilakukan bersamaan, termasuk ketika melakukan diskresi kepolisian pada kriminalitas geng motor.

4. Tantangan Moderasi Beragama pada Diskresi Kepolisian

a. Arus Informasi yang Tidak Terkontrol

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok di masa kini.¹⁰⁵ Banyaknya informasi dari berbagai media yang ada, malah membuat bingung masyarakat tentang kebenaran suatu berita. Kecepatan informasi yang begitu hebat juga mendukung arus informasi.

Jika dibandingkan dengan masa orde lama dan orde baru, arus informasi di era milenial saat ini adalah yang terhebat. Kebebasan pers yang dilegitimasi pada era reformasi, munculnya beragam perusahaan media

¹⁰⁵Ojinga Gideon, Omiunu, "Conceptualizing Information Need: A Phenomenological Study," *Journal of Library and Information Sciences* 2, no. 2 (2014): 29–54, <https://doi.org/10.15640/jlis.v2n2a3>, hlm. 50.

elektronik, lahirnya media sosial yang membuat semua manusia dapat berkomunikasi melewati batas Negara. Semua hal tersebut merupakan kemajuan yang patut disyukuri, namun juga patut diantisipasi.

Antisipasi di sini adalah upaya mencegah terjadinya suatu dampak buruk akibat arus informasi tersebut. Mungkin sudah menjadi hal biasa di telinga kita saat ini ketika mendengar berita *HOAX*, *hate speech*, *negative campaign*, *black campaign*, berita *prank*, dan sebagainya. Penulis akan mencoba mengurai satu per satu jenis informasi yang menjadi tantangan di masa kini.

Pertama, adalah berita *HOAX*. Isitilah *HOAX* merupakan nama lain dari berita palsu atau berita bohong. Banyaknya informasi yang beredar membuat masyarakat tidak dapat membedakan mana berita benar dan berita bohong. Hal tersebut menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggungjawab dengan membuat berita palsu atau berita bohong yang sifatnya negatif dan memprovokasi.¹⁰⁶ Akibatnya, semua berita palsu tersebut harus dilakukan konfirmasi yang membuat heboh masyarakat. Fenomena berita *HOAX* lambat laun dapat merubah perilaku masyarakat yang ikut-ikutan menyebarkan berita palsu tersebut tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu.¹⁰⁷

¹⁰⁶Christiany Juditha, "Hoax Communication Interactivity in Sosial Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)," *Journal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31-44, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>, hlm. 40.

¹⁰⁷Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58-70, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>, hlm. 60.

Oleh karena itu pemerintah dengan gencar mengkampanyekan sikap anti *HOAX* agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kedua, adaah *hate speech* atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang mampu memancing sebuah provokasi massa. Kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia biasanya dilakukan oleh oknum yang memaksakan pemikirannya kepada orang lain dengan menyampaikan semua aspek negatifnya, tanpa melihat sisi positif.¹⁰⁸ Namun, istilah *hate speech* ini juga rawan disalahgunakan dalam bidang politik. Terlebih lagi pada saat kampanye politik, di mana lawan politik bisa saja menjadikan ujaran kebencian tersebut sebagai kedok untuk menjatuhkan lawannya. Berbagai bentuk *hate speech* dapat dilihat saat ini pada media sosial, sehingga peran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi perlu ditingkatkan lagi dalam mencegah dan memberantas ujaran kebencian tersebut.

Ketiga, adalah *negative campaign* yang merupakan terjemahan bahasa inggris dari kampanye negatif. Kampanye adalah kegiatan menyampaikan pendapat dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kampanye merupakan hal yang biasa dilakukan di Negara demokrasi, tetapi kampanye negatif merupakan sesuatu yang buruk. Kampanye negatif dapat diartikan sebagai upaya menjelekkan orang lain dengan mengumbar kejelekan atau

¹⁰⁸ Sean MacAvaney et al., "Hate Speech Detection: Challenges and Solutions," *PLOS ONE* 14, no. 8 (August 20, 2019): e0221152, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221152>.

aib dari sosok figur yang sedang maju dalam pesta demokrasi.¹⁰⁹ Tentunya hal tersebut merupakan perbuatan tidak etis dan beriktikad buruk, sehingga perlu dicegah dan ditindak tegas. Indonesia sebagai Negara demokratis kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat sangat rawan dengan *negative campaign* ini. Arus informasi di media elektronik dan media cetak ditambah media sosial mempermudah terjadinya kampanye negatif ini, sehingga edukasi pada tiap individu merupakan cara terbaik agar kita tidak termakan oleh *negative campaign* tersebut.

Selanjutnya, yang ke empat adalah *Black Campaign* atau kampanye hitam. Istilah *black campaign* memiliki arti yang sangat buruk karena mengandung berita bohong dan fitnah. Praktek-praktek kampanye hitam tersebut dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak kehidupan bangsa.¹¹⁰ Kemajuan teknologi saat ini, mampu membuat seseorang melakukan perubahan atau *edit* foto atau video, sehingga hasilnya seolah-olah benar adanya. Indonesia yang menganut sistem multi partai sangat rawan untuk terjadi kampanye hitam, terlebih lagi pemilihan umum telah sampai ke pelosok desa dengan adanya otonomi daerah. Oleh karena itu, lagi-lagi

¹⁰⁹Young Min, "News Coverage of Negative Political Campaigns: An Experiment of Negative Campaign Effects on Turnout and Candidate Preference," *Harvard International Journal of Press/Politics* 9, no. 4 (October 1, 2004): 95-111, <https://doi.org/10.1177/1081180X04271861>, hlm. 107.

¹¹⁰Hardianto Djanggih Nyndya Fatmawati Octarina, "Legal Implication of Black Campaigns on The Sosial Media in The General Election Process," *Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 271-282, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115>, hlm. 278.

anggota kepolisian yang telah berada di seluruh wilayah Nusantara memiliki peran ganda, selain menjaga keamanan dan ketertiban, juga menjaga dan mencegah terjadinya perpecahan akibat *black campaign*.

Arus informasi terakhir atau yang kelima, yang menjadi tantangan adalah berita *prank*. Istilah *prank* merupakan terjemahan bahasa Inggris dari jahil atau usil. Platform yang paling ramai saat ini dengan konten prank adalah *Youtube*. Pembuat konten atau *Youtuber* memegang peran sentral dalam lahirnya informasi prank ini. Begitu banyak konten-konten video prank yang dapat kita lihat sehari-hari, bukan hanya di media sosial *Youtube*, tetapi juga media sosial lain, seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, dan sebagainya. Tujuan dari berita prank ini adalah menjahili orang lain, namun telah sampai pada fase merusak perilaku masyarakat, di mana bisa saja semua informasi yang ada tidak dapat dipercaya lagi, atau dengan kata lain masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap informasi di media sosial. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Sub Kekayaan Intelektual merupakan *leading sector* dalam mencegah dan menindak berita *prank* ini.

Namun, menurut penulis, makna dari besarnya arus informasi tersebut adalah pemerintah dan segenap *stakeholder* dituntut untuk melakukan tugasnya secara transparan. Saat ini, segala kegiatan pemerintah dapat dilihat oleh publik melalui rekaman atau foto yang dengan cepatnya dapat beredar melalui media sosial.

Berjalannya arus informasi tersebut harus disambut oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah harus

membuat regulasi, mengambil, dan mengembangkan informasi tersebut menjadi suatu inovasi yang dikombinasikan dengan potensi daerah masing-masing. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka perkembangan suatu daerah, termasuk penelitian dan inovasi daerah melalui Balitbang dan akan meningkat.¹¹¹

Meskipun, kehadiran berita *HOAX*, *hate speech*, *negative campaign*, *black campaign*, dan berita *prank* tersebut mengganggu masyarakat, namun perilaku moderasi beragama dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut, khususnya bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Seorang aparat kepolisian harus mampu menjalankan tugasnya dengan pandai memilah mana berita palsu dan mana berita benar. Terdapat beberapa kasus di mana polisi melakukan salah tangkap yang melanggar dan merugikan Hak Asasi Manusia (HAM) korban salah tangkap tersebut. Namun, penegakan terhadap kasus seperti itu, terkadang tenggelam ditelan bumi yang tidak diketahui kabar dan akhirnya. Oleh karena itu, peran dan beban seorang aparat kepolisian tidaklah kecil, sehingga merupakan suatu amanah dan kesempatan besar menjadi aparat kepolisian untuk menabung amal kebaikan bagi masyarakat luas.

¹¹¹Rahman Syamsuddin and Muhammad Ikram Nur Fuady, "Upaya Penguatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah Di Kota Palopo," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 63-79, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>, hlm. 70.

b. Sikap Apatis Masyarakat

Sikap apatis merupakan perwujudan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Apatis dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, apapun yang terjadi maka individu yang bersikap apatis tidak akan peduli lagi.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, hal tersebut sangat berbahaya. Kelebihan Indonesia dengan berbagai keragaman yang ada dapat dirusak oleh sikap apatis ini. Bayangkan saja ketika terjadi konflik pada suatu daerah, tetapi konflik tersebut malah dibiarkan, dan tidak diselesaikan dengan solusi terbaik, maka kekacauan adalah sesuatu yang mutlak terjadi.

Selanjutnya, sikap apatis dapat lahir karena faktor ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Contoh nyata yang dapat dilihat adalah sikap pemerintah dalam menindak kasus korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan merugikan bangsa Indonesia. Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai panglima pemberantas koruptor belum mampu menghilangkan korupsi hingga saat ini. Terlebih lagi, sikap pemerintah yang cenderung mendukung pihak-pihak tertentu yang bersebrangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi terakhir adalah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 lalu mendapatkan banyak protes dari kalangan mahasiswa, sarjana hukum, dan internasional, tetapi pemerintah tetap melakukan revisi.

Ketidakpuasan selanjutnya adalah revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendapat banyak sorotan tentang parahnya penegakan hukum di Indonesia. Berbagai revisi regulasi terus dilakukan tanpa melihat keinginan masyarakat merupakan preseden buruk bagi pemerintah karena hukum ada karena adanya masyarakat. Hal inilah yang melahirkan sikap apatis masyarakat, sehingga apapun kebijakan pemerintah, maka rakyat tidak akan peduli lagi.

Institusi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak boleh sampai bersikap apatis. Aparat kepolisian merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membantu pemerintah dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Justru aparat kepolisianlah yang harus menjadi penglima dalam mengajak dan mengayomi masyarakat sebagaimana tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh nyata yang dapat dilakukan adalah aktifnya aparat kepolisian dalam setiap kegiatan masyarakat, seperti kerja bakti, pesta rakyat, karang taruna karena seyogyanya aparat kepolisian adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat yang berketuhanan, di mana moderasi beragama merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

c. Intervensi Asing

Kedaulatan suatu bangsa adalah berada pada bangsa itu sendiri, tidak terkecuali Indonesia. Segala upaya dan kegiatan pemerintah adalah sebesar-besarnya untuk

kemakmuran masyarakat Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari institusi pemerintah juga tidak luput dari intervensi asing. Intervensi yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan Negara lain (asing) untuk mempengaruhi Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukan suatu rahasia lagi bahwa Indonesia saat ini masih bergantung pada Negara lain dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia dan ekonomi. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mudah mengikuti kemauan Negara lain. Salah satu contoh nyata banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang tertangkap membawa Narkoba masuk ke Indonesia.

Narkoba merupakan barang terlarang dan memiliki sanksi berat bagi pengguna maupun pengedar. Akibatnya, banyak WNA yang terancam sanksi pidana mati di Indonesia. Contohnya adalah kasus warga Negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang dipidana hukuman mati pada tahun 2006. Pihak Australia selalu melakukan negosiasi dengan Indonesia agar warganya tidak dipidana mati, tetapi demi menjaga penegakan hukum, maka warga Australia tersebut tetap dieksekusi mati.

Meskipun Indonesia terus berbenah memperbaiki sistem yang ada dari dalam, tetapi intervensi asing bisa saja selalu hadir. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menerapkan moderasi beragama dengan prinsip adil dan berimbang untuk dapat mencegah pengaruh intervensi asing.

d. Perlunya Sanksi yang Tegas

Sanksi atau hukuman merupakan elemen penting yang wajib dihadirkan dalam hukum. Hal ini dapat menjadi suatu ancaman jika tidak ada sanksi, apalagi bila ada sanksi, namun tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berbagai isu penerapan sanksi yang tidak sesuai di Indonesia, mulai dari isu politik, isu hukum, dan isu-isu lainnya, sebagian besar terjadi akibat penerapan sanksi yang tidak tegas. Hukum Indonesia membagi jenis sanksi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Sanksi Administratif;
- 2) Sanksi Perdata;
- 3) Sanksi Pidana;
- 4) Sanksi Sosial.

Dari sekian jenis sanksi tersebut, sanksi sosial merupakan sanksi yang termasuk baru di Indonesia. Sanksi sosial adalah reaksi sosial dari persetujuan atau penolakan dalam menanggapi tindakan seseorang. Sanksi sosial memberlakukan standar perilaku yang dianggap dapat diterima secara sosial dan ini penting bagi masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dan menjaga ketertiban. Kohesi sosial dan kerja sama tergantung pada sanksi sosial dan mereka sangat penting bagi organisasi, kelompok sosial dan masyarakat untuk bekerja bersama secara efektif.

Sanksi sosial mendorong perilaku yang dianggap sesuai dan menghalangi perilaku yang tidak sesuai. Pola dan aturan perilaku yang representatif atau khas ini disebut

norma sosial. Oleh karena itu, sanksi adalah reaksi dari orang lain terhadap perilaku individu atau kelompok yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma sosial tertentu dipenuhi.

Norma sosial sangat penting untuk berfungsinya masyarakat dan kelompok sosial secara efektif. Masyarakat tidak akan ada tanpa norma sosial dan sanksi sosial yang memberlakukannya. Norma sosial mengatur perilaku anggota kelompok dan sanksi sosial adalah bagian penting dari proses kontrol sosial. Norma dan sanksi memberikan ekspektasi perilaku dan standar yang memungkinkan interaksi sosial dan pertukaran.

Sanksi sosial adalah mekanisme penegakan norma sosial. Mereka adalah alat untuk membentuk dan mempertahankan norma-norma sosial. Sanksi sosial adalah metode penting untuk mengkomunikasikan sifat norma sosial, sehingga mereka memiliki peran penting dalam penciptaan dan pemeliharaan norma sosial.

Norma dan penegakan melalui sanksi sosial menciptakan "kekakuan" atau viskositas yang cenderung memperlambat laju perubahan budaya. Ini menciptakan stabilitas budaya yang membuat perilaku manusia lebih dapat diprediksi yang mengurangi risiko yang seharusnya melekat dalam interaksi dan pertukaran.

Contoh sanksi sosial adalah reaksi sosial yang mewakili penilaian atas perilaku orang lain dan dapat sama halusnyanya seperti anggukan atau senyuman untuk kesesuaian atau goyangan kepala atau pandangan ketidaksetujuan untuk ketidaksesuaian. Sanksi sosial sering dianggap sebagai

hukuman, seperti sanksi hukum. Namun, sanksi sosial juga dapat menjadi positif untuk kepatuhan terhadap standar normatif.

Ada banyak sekali contoh sanksi sosial, juga berbagai tingkat keparahan. Tidak semua norma memiliki sanksi yang sama karena tidak semua norma sama pentingnya dalam suatu budaya.

Sanksi negatif dapat mencakup rasa malu, ejekan, sarkasme, kritik, ketidaksetujuan, diskriminasi sosial, dan pengucilan serta sanksi yang lebih formal seperti hukuman dan denda.

Sanksi positif dapat mencakup perayaan, ucapan selamat, pujian, pengakuan sosial, promosi sosial, dan persetujuan, serta sanksi formal seperti penghargaan, bonus, hadiah, dan gelar.

Sanksi tidak harus diaktifkan untuk menjadi efektif. Seringkali kemungkinan hadiah atau hukuman cukup untuk mendorong kepatuhan. Antisipasi kemungkinan sanksi yang mungkin sering cukup untuk menahan perilaku yang dimaksud. Ketika orang-orang menganggap bahwa sanksi sosial ada untuk ketidakpatuhan, mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan diri jika mereka juga merasakan bahwa perilaku tersebut tersebar luas di antara rekan-rekan mereka.

Sanksi sosial didukung oleh norma. Pada setiap kelompok sosial ada sanksi sosial yang dianggap normal dan sesuai dan yang lain tidak. Sebagai contoh, di Australia kritik adalah tipikal bahkan ketika dilakukan secara terbuka untuk

pelanggaran norma-norma sosial yang relatif rendah, di Jepang hal ini biasanya tidak dapat diterima, atau hanya diperuntukkan bagi pelanggaran norma tingkat tinggi atau ekstrim.

Sanksi sosial juga normatif, penegakan dan kegagalan untuk menegakkan juga dapat dikenakan sanksi. Penyimpangan dari, atau kesesuaian dengan, norma sosial dapat membawa harapan normatif pada pihak ketiga baik untuk sanksi atau tidak sanksi. Jadi tindakan sanksi juga dapat dikenai sanksi, dan mungkin tindakan sanksi tersebut dapat dikenai sanksi, dan seterusnya sebagaimana dianggap sesuai dan diperlukan.

Ini telah menyebabkan beberapa penulis memanggil sanksi metanorma karena mereka adalah norma tingkat atas yang memberitahu orang untuk menghargai atau menghukum pelanggar norma tingkat bawah. Dalam teori permainan, sanksi norma secara efektif merupakan dilema sosial orde kedua.

Walaupun sanksi bersifat normatif, dan kekuatan sanksi kemungkinan berkaitan dengan kepentingan norma yang dirasakan terkait dengan keyakinan moral dan potensi konsekuensi individu atau kelompok. Kemungkinan dan tingkat keparahan sanksi juga berkaitan dengan apakah hal itu memfasilitasi kesejahteraan dan kelangsungan kelompok, risiko yang dirasakan dan biaya sanksi, dan membantu menghindari konflik antar pribadi.

Sanksi sosial sangat bergantung kepada tipe masyarakat setempat. Hal tersebut berhubungan dengan diterimanya atau tidak suatu bentuk hukuman atau sanksi

yang akan diterapkan, sehingga sanksi sosial dapat dikatakan berkarakter lokal.¹¹² Ada banyak interpretasi sosiologis yang berbeda tentang sanksi dan fungsinya. Seperti banyak fenomena sosial lainnya, ada banyak upaya untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai jenis sanksi sosial. Berikut adalah tipe sanksi sosial:

1) Sanksi Sosial Informal

Sanksi informal diberlakukan oleh individu atau kelompok atas individu atau kelompok lain tanpa menggunakan sistem formal. Ada beragam jenis sanksi informal dan mereka adalah pekerja keras untuk penciptaan dan pemeliharaan norma-norma sosial.

Sanksi sosial informal hadir di hampir setiap pertukaran sosial, bahkan jika mereka sangat halus. Ini terutama benar mengingat sanksi tidak perlu diberlakukan untuk menjadi efektif.

Sama seperti norma-norma sosial adalah pekerja keras sehari-hari dari kontrol sosial dan hukum umumnya untuk *endgames*, sanksi informal adalah pekerja keras sehari-hari untuk mempertahankan struktur kontrol sosial dan sanksi formal umumnya jarang diterapkan (walaupun kemungkinan mereka adalah pengaruh yang konstan).

¹¹²Muhammad Ikram and Nur Fuady, "Siri ' Na Pacce Culture in Judge ' s Decision (Study in Gowa , South Sulawesi Province)," *Fiat Justisia* 13, no. 3 (2019): 241–254, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1684>, hlm. 250.

2) Sanksi Sosial Formal

Sanksi formal dijatuhkan melalui sarana formal oleh suatu institusi (atau perwakilan) pada individu atau kelompok. Mereka biasanya didefinisikan dengan jelas dan dapat mencakup denda untuk penyimpangan atau penghargaan untuk kepatuhan. Mereka sering didokumentasikan dalam kebijakan, peraturan, atau regulasi.

Sanksi formal cenderung juga memiliki konsekuensi informal. Misalnya, hukuman pidana cenderung menciptakan stigma dan potensi pengucilan sosial.

3) Sanksi Sosial Internal

Sanksi internal adalah konsekuensi yang dikenakan oleh individu pada diri mereka sendiri, berdasarkan kepatuhan dengan norma sosial. Jadi, misalnya, seseorang mungkin menderita rasa malu, malu atau depresi sebagai akibat dari ketidakpatuhan dan pengucilan terkait dari kelompok sosial.

Salah satu perbedaan utama antara sanksi internal dan eksternal adalah bahwa meskipun sanksi internal seperti rasa bersalah hanya memerlukan pengetahuan sendiri tentang perilaku seseorang, sanksi eksternal memerlukan pengetahuan oleh orang lain tentang perilaku seseorang.

4) Sanksi Sosial Eksternal

Sanksi eksternal, di sisi lain, adalah konsekuensi yang dijatuhkan oleh orang lain dan termasuk hal-hal seperti pengusiran dari suatu kelompok, penghinaan publik,

hukuman oleh manajemen, dan penangkapan dan pemenjaraan, antara lain.

5) Sanksi Sosial Untuk Norma-Norma Hukum dan
Norma-Norma Deskriptif

Perbedaan lain yang berpotensi relevan adalah antara jenis norma, karena sanksi sosial adalah mekanisme penegakan norma sosial. Tipe-tipe norma yang diterima secara umum adalah deskriptif dan tidak mengikat.

Norma deskriptif adalah apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam situasi tertentu, yaitu, apa yang khas atau normal dalam situasi tertentu dapat dipahami dengan mengamati perilaku orang lain. Norma injunctive menggambarkan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi sehingga apa yang kelompok anggap pantas, bermoral, atau perlu. Mereka berhubungan dengan aturan atau kepercayaan tentang apa yang merupakan perilaku yang disetujui secara moral dan tidak disetujui.

Perbedaan ini mungkin menunjukkan bahwa sanksi sosial hanya akan berhubungan dengan norma-norma penghukuman, karena norma-norma ini mewakili apa yang dianggap benar dan salah. Namun, dalam kenyataannya ada sedikit perbedaan antara bagaimana orang melihat norma-norma tambahan dan norma-norma deskriptif dalam hal sanksi.

Beberapa orang berpendapat bahwa sanksi berkaitan dengan norma-norma hukum dan tidak dengan norma-norma deskriptif, namun norma-norma deskriptif sering mengambil karakter yang seharusnya bahkan jika itu hanya

untuk menjaga ketertiban sosial. Misalnya, di sebuah kafe lokal yang populer, normanya adalah bergerak ke sisi kanan konter setelah memesan. Ini adalah norma deskriptif karena tidak ada keharusan moral, itu hanya apa yang dilakukan semua orang. Tidak mematuhi norma ini masih dapat mengakibatkan sanksi (baik internal [malu] dan eksternal [terlihat tidak setuju]) meskipun kurangnya keharusan moral, karena itulah yang harus dilakukan seseorang untuk menjaga efisiensi dan ketertiban sosial.

Oleh karena itu, sanksi sosial merupakan sanksi yang tepat dilakukan di Indonesia mengingat latar belakang Indonesia dengan berbagai keragaman sosial sangat rawan menjadi sumber konflik sekaligus sumber kekuatan. Namun, hal tersebut dapat ditutupi dengan sanksi sosial yang tentunya dikombinasikan dengan prinsip adil dan berimbang dari moderasi beragama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang lahir dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena perbuatan meresahkan yang dilakukan oleh geng motor yang didominasi oleh remaja dan anak merupakan bentuk kenakalan remaja yang telah bertransformasi kepada bentuk kriminalitas yang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat. Hal tersebut menggiring keinginan masyarakat agar geng motor diberikan tindakan dan sanksi tegas dalam proses penegakan hukum.
2. Kriminalitas geng motor terjadi disebabkan oleh karena beberapa faktor, yaitu tekanan ekonomi; sudah menjadi kebiasaan; lingkungan pergaulan;

mendapatkan pengakuan sebagai geng motor; tidak adanya fasilitas untuk berekspresi; minimnya tingkat pendidikan; dan media massa.

3. Diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan solusi alternatif dalam memberantas kriminalitas geng motor yang dapat dilakukan apabila terdapat kekosongan hukum yang mengatur atau dasar hukum yang kabur dan tidak melanggar hak asasi manusia.
4. Bentuk diskresi kepolisian di lapangan sangat bergantung dengan karakter individu aparat kepolisian itu sendiri. Moderasi beragama hadir sebagai pengendali dan pengawas dari dalam individu tersebut agar melakukan diskresi dengan prinsip adil dan berimbang.
5. Moderasi beragama dapat diinternalisasikan ke dalam tiap individu aparat kepolisian melalui pemahaman yang baik tentang agama dan menambah intensitas bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemahaman aparat kepolisian dan masyarakat sama, sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat membaik dan mendekatkan silaturahmi antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil.

B. Rekomendasi

1. Dalam menangani aksi kriminal geng motor, khususnya yang pelakunya adalah kategori anak, seyogyanya mengedepankan kepentingan anak. Mengingat bahwa anak tersebut masih bisa dibina dengan baik oleh orang tua atau dengan bantuan pemerintah melalui lembaga panti sosial untuk bisa kembali ke masyarakat dan tidak mendapatkan *label*/buruk dari masyarakat.
2. Agar setiap aparat kepolisian menginternalisasikan prinsip moderasi beragama dalam setiap tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agama, Republik Indonesia Kementerian. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ali, Achmad. *Yusril Versus Kriminal Justice System*. Makassar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Anonim. "Kejahatan Geng Motor Di Makassar." Koran Tempo.com, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. "Arti Kata Kewenangan," 2019.
- Aryanto. "The Discussion About Discretion," 2013. <http://faculty.ncwc.edu/mstevens/205/205lec09.html>.
- Asrori, Ahmad. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas." *Kalam: Jurnal Studi*

- Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2017): 253–68. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- Aswin. “Diskusi Tentang Geng Motor.” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015. <http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motorkenakalan-remaja.html#.VFeFBVcnb5M>.
- Aziz, Syaeful. “Kenakalan Remaja Geng Motor,” 2015. <https://blog.uad.ac.id/syaeful1300001097/2015/01/13/makalah-kenakalan-remaja-geng-motor/>.
- Cakra, Andi. “Hasil Wawancara.” 2015.
- Dkk, Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dymond, Abi. “Towards a Socio-Technical Understanding of Discretion: A Case Study of Taser and Police Use of Force.” *Policing and Society*, September 16, 2019, 1–15. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1660338>.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Emrald, Ichsan. “Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Polri Menurun.” *Republika Online*, 2019. <https://www.republika.co.id/berita/q37hf7349/tingkat-kepuasan-masyarakat-pada-polri-menurun-2019>.
- Evi Fitriyani Aulia. “Kekuasaan Dan Kewenangan.” *Kompasiana.com*, 2015. <https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan Jhon Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Febriyan, Yanata Putra. "Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian." Universitas Hasanuddin, 2013.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edisi Ke S., 2019.
- Gideon, Omiunu, Ojinga. "Conceptualizing Information Need: A Phenomenological Study." *Journal of Library and Information Sciences* 2, no. 2 (2014): 29–54. <https://doi.org/10.15640/jlis.v2n2a3>.
- Gumz, Edward J, and Cynthia L Grant. "Restorative Justice: A Systematic Review of the Social Work Literature." *Families in Society* 90, no. 1 (January 1, 2018): 119–26. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853>.
- Hasan, Mulyani. "Geng Motor Di Bandung," 2007. mulyanihasan.wordpress.com.
- "Hasil Wawancara." 2015.
- Ikram, Muhammad, and Nur Fuady. "Siri ' Na Pacce Culture in Judge ' s Decision (Study in Gowa , South Sulawesi Province)." *Fiat Justisia* 13, no. 3 (2019): 241–54. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1684>.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012.
- Indonesia Online, Kamus Besar Bahasa. "Arti Kata Gerombolan," 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gerombolan>.
- Indonesia, Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1/PUU-VIII/2010 (2010).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (1981).
- Ismail, IPTU. "Hasil Wawancara." 2015.

- Jauhar. "Geng Motor Di Indonesia Perspektif Fenomenologi." *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 3 (2018): 58–59.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- JHA, Logemann. *Over De Theorie van Een Stellig Staatsrecht*. Leiden: Leiden Universitaire Pers, 1948.
- Jubaidi, H. Ahmad, Nanik Pujiastuti, and Salasiah. "Pencegahan Paham Terorisme Dan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Timur." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–4.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27259>.
- Juditha, Christiany. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)." *Journal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31–44.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Jufri, Muhammad. "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu." *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 12 (2015): 76–84.
- Juhnke, Ralph, and Julia A Bermann. "Police Discretion: Relations of Experience to Officers' Beliefs and Arrest Decisions." *American Journal of Kriminal Justice* 12, no. 2 (1988): 243–53.
<https://doi.org/10.1007/BF02888937>.
- Khaerul, Khaerul, Julianto Julianto, and Salmah Salmah. "Studi Kualitatif Geng Motor Anarkis Di Makassar." *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh* 3, no. 1 (2016): 481–90.
- Krisnaptik. "Diskresi Kepolisian." Accessed June 16, 2020.
<https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum->

- kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/ Krisnaptik
Diskresi Kepolisian.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal Press, 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ke. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lange, Shannon, Jürgen Rehm, and Svetlana Popova. "The Effectiveness of Kriminal Justice Diversion Initiatives in North America: A Systematic Literature Review." *International Journal of Forensic Mental Health* 10, no. 3 (2011): 200–214. <https://doi.org/10.1080/14999013.2011.598218>.
- M., Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradya Paramita, 1991.
- MacAvaney, Sean, Hao-Ren Yao, Eugene Yang, Katina Russell, Nazli Goharian, and Ophir Frieder. "Hate Speech Detection: Challenges and Solutions." *PLOS ONE* 14, no. 8 (August 20, 2019): e0221152. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221152>.
- Masyhar, Ali, and Ridwan Arifin. "Urgensi Pembentengan Masyarakat Dari Radikalisme Dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1, no. 01 (2018): 1–12. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27259>.
- MBA, Edwin. *Kamus Pelajar*. Jakarta: Tamer Press, 2013.
- Min, Young. "News Coverage of Negative Political Campaigns: An Experiment of Negative Campaign Effects on Turnout and Candidate Preference." *Harvard International Journal of Press/Politics* 9, no. 4 (October 1, 2004): 95–111. <https://doi.org/10.1177/1081180X04271861>.

- Muhammad Ikbāl. "Implementation of Discretion Perspective of Penal Policy (Study of Yogyakarta Police Department)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 1 (2018): 75–92. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>.
- Nandang Alamsah Deliarnoor. et.al. *Teori & Praktek Kewenangan*. First Edit. Yogyakarta: PANDIVA BUKU, 2017.
- Nandang, Sambas. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative And Quantitative Approaches*. Edisi Ketu. Boston: Pearson Education, Inc., 2011.
- Nyndya Fatmawati Octarina, Hardianto Djanggih. "Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process." *Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 271–82. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115>.
- Palinkas, Lawrence A, Sarah M Horwitz, Carla A Green, Jennifer P Wisdom, Naihua Duan, and Kimberly Hoagwood. "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research." *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42, no. 5 (2015): 533–44. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. UGM Press, 2011.
- Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2015.
- Pudi, Rahardi. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, Dan Reformasi POLRI*. Surabaya, 2014.

- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58-70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.
- Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Edited by Frans J. Rengka Karolus Medan. Buku Kompas, 2003.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 Tahun 2002, 2 (2002).
- Ridlo, Muhammad. "Mbok Minah Dan Catatan Hitam Peradilan Di Hari Kehakiman." *Liputan6*, 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/3901107/mbok-minah-dan-catatan-hitam-peradilan-di-hari-kehakiman>.
- S, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002.
- Sabarisman, Irmayani; Badrun Susantyo; B. Mujiyadi; Anwar Sitepu Togiaratua Nainggolan; Sugiyanto; Muslim. "Fenomena Geng Motor (Studi Di Beberapa Kota Di Jawa Barat)." Jakarta, 2017.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian : Polri Dan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2007.
- SERDAN, IPTU. "Hasil Wawancara." 2015.
- Soebroto Brotodiredjo, Sitompul, Edward Syahperenong. *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*. First. Bandung: Tarsito Pubhliser, 1985.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 15-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

- Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat. *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Suminar, Purwanti Hadisiwi; Jenny Ratna. "Konstruksi Sosial Anggota Geng Motor Di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 1 (2013): 1–10. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n1.1>.
- Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Sutadi, Aryanto. *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013.
- Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah Di Kota Palopo." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 63–79. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ket. Jakarta: Balai Pustaka temen Pendidikan Nasional, 2007.
- W, R Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2020): 187–97. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>.
- Wahyuni, Astri. "Rasio Polisi Dan Masyarakat 1 : 1700." Tempo.co, 2005.
- Winarno, Endro, Muhadjir Darwin, Warsito Utomo, and Supra Wimbarti. "Kebijakan Proaktif Berbasis Hak Penerapan Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum.” *Jurnal PKS* 14, no. 3 (2015): 263–78.

Young, Susan, Ben Greer, and Richard Church. “Juvenile Delinquency, Welfare, Justice and Therapeutic Interventions: A Global Perspective.” *BJPsych Bulletin* 41, no. 1 (2017): 21–29. <https://doi.org/DOI: 10.1192/pb.bp.115.052274>.

TENTANG PENULIS



Muhammad Ikram Nur Fuady, SH., MH., merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Makmur Adang (alm.) dan Nurlaelah Umar. Lahir pada 29 Juli 1992 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Menikah pada 7 Juli 2019 dengan Mega Fia Lestari, M.Sc., dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ghaniy Gagarin Ikramakmur. Pendidikan formal penulis dimulai dari Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014, dilanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di kampus yang sama pada tahun 2016.

Sejak 2019 sampai saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berkonsentrasi pada Hukum Pidana. Sebelumnya, penulis bekerja pada bidang pengawasan pelayanan publik sebagai asisten Ombudsman Republik Indonesia (2017-2019) dan Tutor di Universitas Terbuka (2017-sekarang). Beberapa karya yang telah dihasilkan penulis adalah *Siri' Na Pacce in Judge's Decision* yang dipublikasi pada Jurnal Fiat Justisia (Akreditasi SINTA 2) dan Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo yang termuat dalam Jurnal Wawasasn Yuridika (Akreditasi SINTA 2). Beliau dapat dihubungi melalui surel ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didasari oleh keresahan terhadap berbagai aksi kriminal geng motor di Kota Makassar. Geng motor merupakan orang-orang yang hobinya bersepeda motor dan identik dengan kekerasan, seperti pembegalan, penganiayaan, bahkan sampai menelan korban jiwa. Keterlibatan remaja dan anak yang masih duduk di bangku sekolah semakin menambah keresahan, yang secara jelas menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian dengan peran melindungi, menciptakan keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibekali kewenangan diskresi yang dapat digunakan sebagai alat memberantas kriminalitas geng motor. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada anggota kepolisian yang tidak menggunakan diskresi atau melakukan kesalahan dalam penerapannya. Optimalisasi kewenangan diskresi tersebut dapat dilakukan dengan mengombinasikan konsep moderasi beragama dengan diskresi kepolisian. Internalisasi prinsip adil dan berimbang dari konsep moderasi beragama dalam penerapan diskresi kepolisian memberikan hasil positif bagi kepolisian dan masyarakat. Moderasi beragama di sini hadir sebagai pengendali dan pengawas internal individu aparat kepolisian agar melakukan diskresi dengan prinsip adil dan berimbang.



Muhammad Ikram Nur Fuady, SH., MH. merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Makmur Adang (alm.) dan Nurlaelah Umar. Lahir pada 29 Juli 1992 di Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Menikah pada 7 Juli 2019 dengan Mega Fia Lestari, M.Sc. yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ghaniy Gagarin Ikramakmur. Pendidikan formal penulis dimulai dari Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014, dilanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di kampus yang sama pada tahun 2016.

Sejak 2019 sampai saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berkonsentrasi pada Hukum Pidana. Sebelumnya, penulis bekerja pada bidang pengawasan pelayanan publik sebagai asisten Ombudsman Republik Indonesia (2017-2019) dan Tutor di Universitas Terbuka (2017-sekarang). Beberapa karya yang telah dihasilkan penulis adalah *Siri' Na Pacce in Judge's Decision* yang dipublikasi pada Jurnal Fiat Justisia (Akreditasi SINTA 2) dan Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo yang termuat dalam Jurnal Wawasan Yuridika (Akreditasi SINTA 2).



Alauddin University Press
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63
Romangpolong, Samata,
Kabupaten Gowa

ISBN 978-602-328-264-7

